

OTOMOTIF

Dibekali Interior Modern, Suzuki XL7 Jadi Mobil SUV Keluarga yang Nyaman dan Fungsional

Oleh Redaksi · 2 Okt, 19.41 WIB



Memilih mobil SUV keluarga bukan hanya soal tampilan eksterior atau jumlah fitur yang tercantum dalam brosur. Bagi keluarga yang memiliki mobilitas tinggi, kenyamanan kabin, kapasitas penumpang, kemudahan bermanuver, hingga fitur keselamatan justru menjadi pertimbangan yang lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari.

Suzuki XL7 hadir dengan konfigurasi tiga baris dan kapasitas hingga tujuh penumpang, sehingga penggunaannya dapat disesuaikan untuk rutinitas harian maupun perjalanan bersama keluarga.

Kemacetan membuat waktu yang dihabiskan di dalam mobil bisa cukup panjang, terutama bagi keluarga yang beraktivitas di kawasan perkotaan. Perjalanan mengantar anak ke sekolah,

menuju kantor, berbelanja, atau berpindah dari satu kawasan ke kawasan lain membutuhkan kabin yang mampu menjaga kenyamanan seluruh penumpang.

Ruang juga menjadi faktor penting ketika mobil digunakan bersama keluarga. Pengemudi membutuhkan posisi berkendara yang nyaman, sementara penumpang membutuhkan ruang duduk yang memadai. Pada waktu tertentu,

kebutuhan tersebut bisa berubah ketika keluarga harus membawa barang belanjaan, perlengkapan anak, atau koper untuk bepergian.

Suzuki XL7 mengusung konfigurasi tiga baris tempat duduk dengan kapasitas hingga tujuh orang.

[Selengkapnya di halaman 17 »](#)

NASIONAL

Sebelum OTT, Eks Anak Buah Dirjen Bea Cukai Akui Ngrim Pesan “Hati-Hati Coy”, Kok Bisa!



BANDA ACEH — Pesan singkat “Hati-hati Coy” yang dikirim mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Rizal, kepada bawahannya, Orlando Hamonangan alias Ocoy, kembali menjadi sorotan.

Pesan itu ternyata dikirim sebelum operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

NASIONAL

Sidang Gugatan Ijazah Gibran, Kemendikdasmen Hanya Terima Sertifikat Absensi dan Transkrip Nilai



BANDA ACEH - - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan keberadaan ijazah saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan

permohonan Surat Keterangan Penyetaraan pendidikan SMA pada 2019.

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
Aneka Berita	17

EDUKASI

Rekomendasi AI Pembuat Game Edukasi Terbaik Mudah Digunakan Versi IDN Gaming



Membuat media pembelajaran interaktif kini makin mudah dengan memanfaatkan alat AI berdasarkan rekomendasi Portal IDN Gaming. Memasuki akhir 2026,

tren pemanfaatan kecerdasan buatan di dunia pendidikan berkembang sangat pesat.

[Selengkapnya di halaman 17 »](#)

EKONOMI

Investasi Forklift untuk Bisnis: Faktor Penting yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Membeli



Forklift telah menjadi salah satu peralatan penting dalam mendukung aktivitas operasional berbagai sektor industri, mulai dari pergudangan, manufaktur, logistik, hingga distribusi. Seiring meningkatnya kebutuhan efisiensi dalam proses pemindahan material,

investasi forklift kini tidak lagi dipandang sebagai pengeluaran semata, melainkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas bisnis.

[Selengkapnya di halaman 18 »](#)

NASIONAL

Robohnya Dua Pilar Utama “Solo” di Istana, Edy Mulyadi Soroti Manuver Politik Prabowo



BANDA ACEH — Pergantian sejumlah pejabat strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026) dinilai wartawan senior Edy Mulyadi membawa pesan Politik yang kuat. Salah satu sorotan utamanya adalah bergesernya dua figur yang selama ini disebut memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

[Selengkapnya di halaman 4 »](#)

NASIONAL

Geram Dituding Sidang Ilegal, Hakim MK Minta Ahli Relawan Gibran Keluar Persidangan



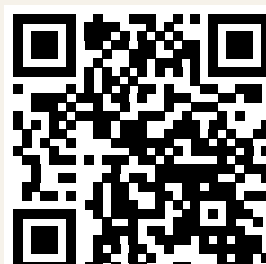
BANDA ACEH - - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) merasa geram atas pernyataan ahli dari pihak relawan Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, yang menyebut persidangan gugatan pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran dan Ketua MK dengan tuduhan ilegal.

[Selengkapnya di halaman 4 »](#)

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Sebelum OTT, Eks Anak Buah Dirjen Bea Cukai Akui Ngirim Pesan “Hati-Hati Coy”, Kok Bisa!

Oleh Redaksi · 2 Okt, 18.47 WIB



BANDA ACEH — Pesan singkat “Hati-hati Coy” yang dikirim mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Rizal, kepada bawahannya, Orlando Hamonangan alias Ocoy, kembali menjadi sorotan.

Pesan itu ternyata dikirim sebelum operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam persidangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026), Rizal mengakui dirinya memang mengirim pesan tersebut kepada Orlando.

Namun, Rizal membantah pesan itu dimaksudkan untuk menakut-nakuti. Menurut dia, pesan “Hati-hati Coy” merupakan bentuk peringatan kepada bawahannya agar tidak bermain-main dengan integritas.

“Terkait dengan kemarin ditunjukkan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum adanya chatting WhatsApp antara Bapak dengan Pak Orlando

yang mengatakan 'hati-hati', begitu ya. Hati-hati sedang dipantau, begitu. Nah, apakah benar, Pak, Bapak pernah mengirimkan pesan WhatsApp seperti itu, Pak?” tanya penasihat hukum.

“Iya, memang benar. Dan bukan cuma ke Orlando, tapi juga ke Kasubdit juga saya sampaikan. Yang lain juga saya sampaikan dengan bahasa yang berbeda dan ke grup WA pengawasan juga saya sampaikan dengan bahasa yang berbeda,” jawab Rizal.

Ketika ditanya alasan mengirim pesan tersebut, Rizal menyebutnya sebagai bentuk pengingat agar jajaran di bawahnya menjaga integritas.

“Itu sebenarnya untuk bukan menakut-nakuti, tapi untuk menegaskan ke bawahannya jangan pernah bermain-main dengan integritas,” kata Rizal.

Pesan “Hati-hati” Sebelum OTT Yang membuat pesan tersebut menjadi sorotan adalah konteks waktunya. Sebelumnya, jaksa

KPK telah mengungkap percakapan antara Rizal dan Orlando yang berisi peringatan agar berhati-hati

karena disebut sedang dalam pemantauan.

Percakapan tersebut ditampilkan jaksa dalam persidangan pada Senin (14/9/2026), ketika Orlando dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Rizal dan Sisprian Subiaksono, Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.

Dalam percakapan melalui WhatsApp itu, terlihat adanya komunikasi berupa voice call dan missed call pada 22 Januari 2026.

Orlando saat bersaksi mengakui pesan tersebut berkaitan dengan informasi agar dirinya berhati-hati.

“Itu terkait ada informasi-informasi, Pak, suruh, suruh hati-hati saya, Pak,” ujar Orlando.

Jaksa KPK M Takdir Suhan kemudian menggali maksud peringatan tersebut.

“Baik. Lagi dipantau, dipantau oleh siapa? KPK?” tanya jaksa.

“Iya, Pak,” jawab Orlando.

Percakapan itu menjadi bagian penting dalam persidangan karena pesan peringatan tersebut muncul sebelum perkara suap di lingku-

ngan Bea Cukai terbongkar melalui OTT KPK.

Meski demikian, dalam keterangannya di persidangan, Rizal memberikan penjelasan bahwa peringatan itu tidak hanya ditujukan kepada Orlando. Dia mengaku juga menyampaikan pesan serupa kepada pejabat lain, termasuk Kasubdit dan grup WhatsApp pengawasan, meski menggunakan bahasa yang berbeda.

Rp78,8 Miliar dan Tiga Pejabat Bea Cukai

Dalam perkara ini, tiga pejabat Bea Cukai didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp78,8 miliar.

Ketiganya yakni Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, serta Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Sidang Gugatan Ijazah Gibran, Kemendikdasmen Hanya Terima Sertifikat Absensi dan Transkrip Nilai

Oleh Redaksi · 2 Okt, 17.14 WIB



BANDA ACEH - - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan keberadaan ijazah saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan permohonan Surat Keterangan Penyetaraan pendidikan SMA pada 2019. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyebut dokumen dari UTS Insearch yang diajukan saat itu berupa Certificate of Attendance atau sertifikat absensi dan transkrip nilai.

Hal ini terungkap dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menguji persoalan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Jumat (2/10/2026). Anggota tim penilai dan verifikasi dokumen pendidikan Gibran di Kemendikdasmen, Taufiq Damarjati, memberikan keterangan dalam persidangan.

Taufiq menjelaskan, tim menerima Certificate of Attendance dari UTS Insearch, Sydney, Australia, serta transkrip nilai dan keterangan enrollment. Dokumen itu kemudian menjadi bagian dari bahan yang dinilai untuk proses penyetaraan pendidikan Gibran.

“Untuk transkrip nilai dan juga ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan enrolled juga, apa namanya keterangan enrollment,” ucap Taufiq dalam persidangan.

Menurutnya, tim penilai mencermati mata pelajaran dan mata kuliah yang ditempuh Gibran selama mengikuti pendidikan di UTS Insearch. Hasil pemadanan dengan struktur kurikulum Indonesia kemudian dinilai setara dengan pengetahuan pada jenjang SMK, khususnya program keahlian Akutansi dan Keuangan.

“Dalam hal ini beliau mengikuti perkuliahan dalam 6 semester, ya 6 semester atau 6 trimester karena 1 tahun itu ada 3 trimester gitu. Dan berdasarkan hasil penilaian dari transkrip tersebut, kami menyatakan bahwa beliau memiliki pengetahuan yang disetarakan dengan Sekolah Menengah Kejuruan utamanya terkait program keahlian Akutansi dan Keuangan,” katanya.

Taufiq menjelaskan, pemadanan tersebut dilakukan dengan membandingkan mata kuliah yang diambil Gibran di UTS Insearch dengan struktur kurikulum Indonesia berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 7 Tahun 2018.

“Ya karena kami memadankan antara mata kuliah yang beliau ambil di apa namanya UTS Insearch dengan struktur kurikulum yang ada di Indonesia pada saat itu, tahun 2018, yaitu berdasarkan Perdirjen Nomor 7 Tahun 2018. Seperti itu, Yang Mulia,” ucapnya.

Dalam persidangan, Saldi kemudian menanyakan apakah pernah ada pemohon lain yang menempuh pendidikan di UTS Insearch dan mengajukan penyetaraan pendidikan ke Kemendikdasmen.

“Pertanyaan saya, Pak Taufiq, pernah nggak ada yang ikut di UTS Insearch juga yang meminta penyetaraan ke kementerian?” tanya Saldi.

“Sepanjang saya menjadi tim, sebagai bagian dari anggota tim penilai, saya belum pernah mendapatkan seperti yang Saudara Gibran,” jawab Taufiq.

“Ini baru satu-satunya ya ketika Bapak jadi penilai?” tanya Saldi.

“Untuk UTS Insearch, iya,” jawab Taufiq.

Saldi kemudian mendalami makna Certificate of Attendance yang diajukan Gibran. Taufiq menjelaskan dokumen tersebut pada dasarnya menerangkan bahwa Gibran telah mengikuti pendidikan di UTS Insearch.

“Pertanyaan saya, bagaimana Bapak memaknai kata Certificate of Attendance itu apabila kita komparasi misalnya dengan ijazah lah dalam bahasa Indonesianya? Apa yang Bapak jelaskan ini?” tanya Saldi.

“Iya, Certificate of Attendance lebih kepada keterangan bahwa yang bersangkutan mengikuti pendidikan di UTS Insearch,” jawab Taufiq.

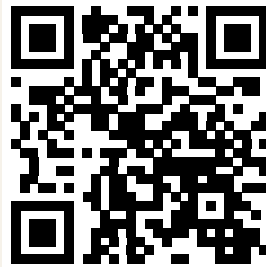
“Kehadiran, ya?” tanya Saldi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

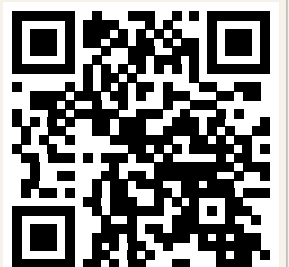
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Bantah KPU, Kemendikdasmen Sebut Tak Pernah Usulkan Pasal untuk Loloskan Gibran Jadi Cawapres

Oleh Redaksi · 2 Okt, 19.22 WIB



BANDA ACEH - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membantah mengusulkan Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka lolos menjadi calon wakil presiden di Pemilu 2024.

Hal ini diucapkan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto, ketika ditanya oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam persidangan, Jumat (2/9/2026).

"Karena menurut saksi dari KPU, Pak Hasim pada waktu kemarin, itu menyampaikan bahwa terjadinya perubahan norma Pasal 18 Ayat (3) PKPU 19/2023 itu karena salah satunya masukan dari Kementerian Pendidikan," kata Enny, di Gedung MK, Jakarta Pusat.

"Pertanyaan saya, mengapa masukan kementerian itu hanya

untuk Pasal 18 ayat (3) untuk PKPU-nya Pilpres, tidak sekaligus untuk PKPU-nya Pileg maupun Pilkada? Kenapa? Karena toh sampai hari ini syarat umumnya pendidikan tuh tidak berubah, yaitu tamat SLTA atau sederajat dengan hal itu. Nah, ini mohon nanti bisa dijelaskan, Pak Dirjen," sambungnya.

Menjawab itu, Gogot menegaskan, pihaknya tidak pernah memberikan usulan seperti yang disampaikan Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari pada persidangan sebelumnya.

"Ibu Enny tadi menanyakan terkait dengan masukan dari kementerian. Kami terus terang tidak ada informasi, Bu, bahwa Kementerian Pendidikan Dasar Menengah memberikan atau usulan terkait dengan pasal yang di PKPU," kata Gogot.

Sebelumnya, dalam pasal tersebut, KPU mengecualikan bukti kelulusan sekolah menengah bagi

bakal calon yang bersekolah di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi pada Pemilu 2024.

"Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi," bunyi Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023.

Hasyim menjelaskan, PKPU 19/2023 telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 itu muncul atas adanya masukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan alasan banyak orang yang ingin menjadi calon legislatif (caleg) mengajukan permohonan surat penyetaraan.

Ia menjelaskan bahwa atas masukan tersebut, aturan pengecu-

alian dirumuskan guna memfasilitasi pihak yang berkepentingan dengan dokumen penyetaraan tersebut.

"Karena semua pasti akan datang ke kementerian untuk minta surat keterangan atau SK penyetaraan ini," ujar Hasyim, bersaksi dalam sidang, Kamis (1/10/2026) malam.

Namun, Hasyim menegaskan bahwa tidak ada motif atau niat munculnya pasal itu untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka lolos menjadi calon wakil presiden di Pemilu 2024.

"Jadi, tidak ada niat, tidak ada pandangan, tidak ada motif untuk meloloskan seseorang atau memudahkan seseorang dalam situasi ini," kata Hasyim, dalam sidang pembuktian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilu 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (1/10/2024).

NASIONAL

Diusir dari Sidang Ijazah Gibran, Rullyandi Laporkan Hakim MK Saldi Isra dan Arsul Sani ke MKMK

Oleh Redaksi · 2 Okt, 17.09 WIB



BANDA ACEH - Ahli hukum tata negara, Muhammad Rullyandi melaporkan Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arsul Sani ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jumat (2/10/2026). Rullyandi merupakan ahli yang dihadirkan Relawan Gibran 08 Nusantara dalam sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

"Dengan dua dasar laporan inilah saya sudah resmi diterima oleh sekretariat MKMK, dan ini surat tertanggal 2 Oktober 2025. Begitu juga terhadap hakim terlapor Arsul Sani," kata Rullyandi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Rullyandi menjelaskan, laporan tersebut dilayangkan buntut tindakan Saldi Isra yang memintanya mencabut pernyataan terkait sidang ilegal. Menurut Rullyandi, pernyataan itu disampaikan di ruang publik, terpisah dari persidangan PHPU yang digelar MK.

Terungkap di Sidang PHPU, Kemendikdasmen Jelaskan Proses Penyetaraan Pendidikan Gibran "Itu adalah hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemerdekaan menyampaikan pendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar '45," ujar Rullyandi.

Dia juga menilai tindakan kedua hakim konstitusi tersebut bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman. Sebab, menurutnya, dia seharusnya diberi kesempatan menyampaikan keterangan sebagai ahli, tetapi justru diminta keluar dari ruang sidang dan keterangannya hanya disampaikan secara tertulis.

"Kenapa saya tidak diperbolehkan memberikan kebebasan dalam pemikiran saya sebagai ahli hukum tata negara, sedangkan yang lain, pihak pemohon diberikan kesempatan yang luas untuk memberikan keterangan ahlinya di dalam persidangan," tegas Rullyandi.

Dia menilai tindakan kedua hakim konstitusi itu melanggar kode etik karena dianggap

mengintervensi kebebasannya dalam menyampaikan kritik terhadap MK. Dia juga menyinggung putusan MK yang membatalkan pasal terkait penghinaan terhadap lembaga.

"Jadi pernyataan saya di luar persidangan yaitu di ruang publik harus dipaksa di dalam persidangan, diintervensi kebebasan kemerdekaan saya untuk mengkritik oleh seorang yang namanya Saldi Isra," tegas dia.

Atas laporan tersebut, Rullyandi meminta pembacaan putusan perkara PHPU Pilpres 2024 ditunda hingga dugaan pelanggaran kode etik itu selesai diperiksa.

"Supaya sama-sama adil. Saya diperlakukan klarifikasi, sehingga saya juga minta supaya hakim MK ini diklarifikasi bahkan diadili. Apakah sudah sesuai apa enggak menurut kode etik dan perilaku hakim MK. Baru kemudian dilanjutkan sidang putusan," ucap dia.

Sebelumnya, MK mengusir Rullyandi saat hendak memberikan keterangan secara lisan sebagai ahli di sidang gugatan terkait ijazah Gibran, Kamis (1/10/2026) malam. Rullyandi hanya diizinkan menyampaikan keterangan secara tertulis.

Peristiwa bermula saat Majelis Hakim hendak mengambil sumpah dua ahli yang diajukan Pihak Terkait yakni Militan Gibran 08 Nusantara. Keduanya yakni Rullyandi dan Ina Setiawati.

Hakim Konstitusi Arsul Sani lebih dahulu meminta klarifikasi kepada Rullyandi terkait pernyataannya di televisi.

"Saya kebetulan menonton, melihat, talkshow Anda yang ada juga Pak Dr. Refly Harun, saya lihat di sebuah televisi, yang mengatakan bahwa persidangan perkara ini ilegal, Ketua Mahkamah Konstitusi ilegal," kata Arsul dalam persidangan.

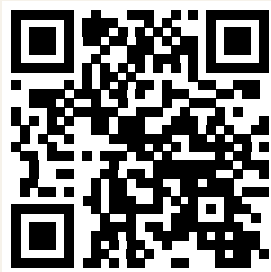
Arsul mempertanyakan konsistensi pernyataan Rullyandi karena bersedia menjadi ahli dalam perkara yang menurutnya ilegal.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

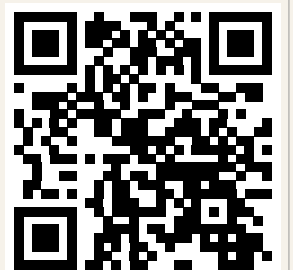
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Robohnya Dua Pilar Utama “Solo” di Istana, Edy Mulyadi Soroti Manuver Politik Prabowo

Oleh Redaksi · 2 Okt, 12.29 WIB



BANDA ACEH — Pergantian sejumlah pejabat strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026) dinilai wartawan senior Edy Mulyadi membawa pesan Politik yang kuat. Salah satu sorotan utamanya adalah bergesernya dua figur yang selama ini disebut memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dua figur tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri dan Pratikno yang sebelumnya menduduki posisi strategis di lingkungan Istana. Edy menyebut keduanya sebagai dua pilar utama yang selama ini menjadi simbol kuatnya pengaruh “Solo” di lingkaran pemerintahan.

Dalam analisisnya, Edy menilai pergantian tersebut bukan sekadar pergantian jabatan administratif, melainkan bagian dari perubahan konfigurasi kekuasaan setelah Prabowo memimpin pemerintahan baru.

“Bagi publik awam, ini mungkin terlihat sebagai pergantian pejabat biasa. Namun bagi pemerhati poli-

tik, perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran jalur pengaruh di pusat kekuasaan,” ujar Edy, Jumat (2/10/2026).

Edy mengaitkan istilah “Solo” dengan jaringan politik yang berkembang dari era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, mengingat sejumlah figur penting dalam pemerintahan sebelumnya memiliki rekam jejak kedekatan dengan Kota Surakarta.

Menurut Edy, Listyo Sigit merupakan salah satu figur yang sering dikaitkan dengan lingkaran tersebut karena pernah menjabat Kapolresta Surakarta dan menjadi ajudan Presiden Joko Widodo.

Sementara Pratikno, kata Edy, dikenal sebagai salah satu figur penting dalam operasional pemerintahan era Jokowi selama satu dekade.

Dengan bergesernya kedua figur tersebut, Edy menilai terdapat perubahan besar dalam peta kekuasaan politik di lingkungan Istana.

“Ketika dua figur utama itu bergeser, maka publik membaca ada perubahan keseimbangan kekuasaan. Apakah ini berarti berakhir-

nya pengaruh Solo? Itu akan terlihat dari perkembangan politik selanjutnya,” kata Edy.

Listyo Sigit Dipindah ke KSP

Presiden Prabowo menunjuk Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) setelah menggantikan posisinya sebagai Kapolri dengan Komjen Suyudi Ario Seto.

Edy menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tetap menjaga stabilitas, tetapi sekaligus mengubah posisi strategis Listyo Sigit

Menurutnya, jabatan Kapolri memiliki kewenangan langsung terhadap institusi kepolisian, sementara KSP memiliki fungsi koordinasi kebijakan di lingkungan Istana.

“Tingkat komando kepolisian berpindah tangan. Sementara Listyo Sigit tetap berada dalam lingkaran pemerintahan melalui posisi KSP,” ujarnya.

Pergantian Kapolri Dinilai Mengandung Pesan Politik

Edy juga menyoroti proses pergantian Kapolri yang berlangsung cepat. Mulai dari pengiriman Surat

Presiden (Surpres) kepada DPR RI, uji kelayakan dan kepatutan, hingga pelantikan dilakukan dalam waktu singkat.

Menurut Edy, kecepatan tersebut menunjukkan adanya keinginan pemerintah untuk segera memastikan perubahan kepemimpinan di tubuh Polri.

Ia menyebut, dalam dinamika politik, proses cepat dapat menjadi cara untuk menghindari tarik-menarik kepentingan yang berpotensi muncul ketika pergantian pejabat strategis berlangsung terlalu lama.

Suyudi Jadi Wajah Baru Polri
Edy menyebut sosok Suyudi Ario Seto memiliki latar belakang berbeda karena tumbuh dari jalur reserse dan penegakan hukum.

penting, seperti Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Banten, hingga Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Geram Dituding Sidang Ilegal, Hakim MK Minta Ahli Relawan Gibran Keluar Persidangan

Oleh Redaksi · 2 Okt, 12.33 WIB



BANDA ACEH - - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) merasa geram atas pernyataan ahli dari pihak relawan Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, yang menyebut persidangan gugatan pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran dan Ketua MK dengan tuduhan ilegal. Pasalnya, Rullyandi melontarkan kritik terhadap persidangan atas tuduhan ilegal itu di luar persidangan.

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengaku menonton diskusi di salah satu stasiun televisi yang dihadiri oleh Rullyandi dan juga Refly Harun selaku tim kuasa hukum Pemohon. Arsul meminta Rullyandi menjelaskan maksud tuduhan ilegal tersebut di hadapan para hakim konstitusi.

“Kebetulan menonton, melihat, ya, talkshow Anda yang ada juga Pak Dr. Refly Harun, saya lihat di sebuah televisi, yang mengatakan bahwa persidangan perkara ini ilegal, Ketua Mahkamah Konstitusi ilegal. Nah, saya mohon penjelasan Anda, kalau persidangan perkara ini ilegal, ya, untuk apa juga ahli Anda menjadi ahli dalam perkara ini, wong persidangannya ilegal menurut Anda kok,” kata Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam sidang lanjutan gugatan Wapres Gibran di Gedung MK, Jakarta, Kamis (1/10) malam.

Tak hanya itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Rullyandi untuk mencabut pernyataannya, jika tetap ingin memberikan keterangan ahli di ruang persidangan.

“Nah, sebelum sebelum dijawab, Anda harus mencabut pernyataan itu. Kalau tidak, Anda tidak bisa menggunakan apa, keahlian saudara di sini. Karena Anda tidak bisa hadir di sidang yang Anda tuduh ilegal ini,” tegasnya.

Merespons pernyataan para hakim konstitusi, Rullyandi tidak langsung mencabut tuduhan ilegal tersebut. Ia mengungkapkan, per-

nyataannya di luar persidangan sebagai sebuah kritik kepada MK.

“Ini adalah momentum saya untuk memberikan pandangan hukum saya sebagai akademisi, sekaligus saya ingin memberikan kritik kepada Mahkamah Konstitusi. Alasan-alasan hukum saya dalam mengkritik, bukan menghina, mengkritik kepada MK supaya meluruskan MK sesuai dengan makna Undang-Undang Dasar '45 mengenai sidang ilegal, mengenai Ketua MK ilegal,” jawab Rullyandi.

Ia pun mengaku sudah menyerahkan keahliannya dalam keterangan tertulis atas tuduhan Ketua MK ilegal pada 2025.

“Ini berkaitan dengan putusan PTUN yang saya ada di dalamnya sebagai ahli. Saya sudah menyerahkan surat saya secara terbuka mengenai Ketua MK ilegal itu pada tahun 2025 sebelum terjadinya persidangan persidangan ilegal ini,” bebernya.

Mendengar pernyataan Rullyandi yang tidak mencabut tuduhan ilegal atas persidangan yang digelar MK, hakim konstitusi Saldi Isra lantas meminta Rullyandi untuk keluar ruang persidangan.

“Kami tadi sudah mendiskusikan, kalau Anda tidak menarik itu, Anda tidak bisa hadir dalam persidangan ini. Yang diterima adalah keterangan tertulisnya dan tidak menyampaikan keterangan lisan. Terima kasih, dan tidak boleh menyampaikan apa-apa lagi. Sudah, cukup. Ya,” cetusnya.

Rullyandi pun kembali menimpali pernyataan hakim konstitusi Saldi Isra. Ia menegaskan, dirinya memahami prinsip-prinsip negara hukum.

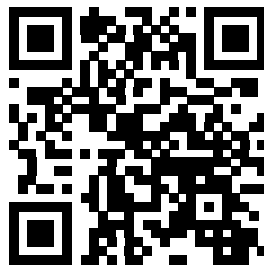
“Pada prinsipnya, kami mengerti prinsip-prinsip negara hukum,” tegasnya.

Hakim Saldi Isra secara tegas meminta Rullyandi untuk keluar persidangan. “Terima kasih, silakan meninggalkan ruang sidang,” pungkasnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

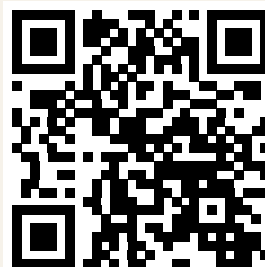
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Indostrategi: Pergantian Kapolri Indikasi Awal Bersih-Bersih ‘Geng Solo’

Oleh Redaksi · 2 Okt, 10.26 WIB



BANDA ACEH -Pergantian Kapolri dari Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kepada Komjen Pol. Suyudi Ario Seto dinilai menjadi indikasi awal perubahan konfigurasi kekuasaan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Riset IndoStrategi Research Intelligence, Ali Noer Zaman, bahkan membaca pergantian tersebut sebagai indikasi dimulainya proses yang ia sebut sebagai "bersih-bersih geng Solo".

"Pergantian Kapolri merupakan indikasi dimulainya secara perlahan bersih bersih geng Solo. Hal itu dilakukan dengan memberi kewenangan yang lebih kecil pada Sigit Sulisty. Ia diganti oleh Suyudi Ario Seto yang memiliki kedekatan dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad," ungkap Ali kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.

Menurut Ali, pergantian Kapolri tersebut tidak berdiri sendiri. Momentum itu berlangsung bersamaan dengan reshuffle kabinet yang mengubah sejumlah posisi strategis.

Di antaranya, Arrmanatha Christiawan Nasir ditunjuk seba-

gai Menteri Luar Negeri, sementara Bahlil Lahadalia mendapat posisi sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Energi. Adapun, Pratikno yang sebelumnya menjabat Menko PMK kini tak lagi berada di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto.

Ali menilai penunjukan Arrmanatha dapat menandai perubahan fokus dalam kebijakan luar negeri dan dalam negeri pemerintahan Prabowo.

"Penunjukan Armanatha Nasir bisa dimakna bahwa Kemenlu akan diberi peran lebih besar dalam diplomasi internasional sementara Prabowo kemungkinan akan memberi perhatian lebih banyak ke masalah dalam negeri. Prabowo tentunya akan mempersiapkan diri untuk pertarungan Politik di pilpres 2029," kata Doktor Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD) ini.

Sementara itu, posisi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai menteri koordinator juga dinilai Ali memiliki dimensi politik dalam relasi pemerintah dengan Partai Golkar.

"Kejutan dalam reshuffle ini adalah pemberian kursi menko ke Bahlil, menunjukkan semakin dekatnya relasi Golkar dan Prabowo," katanya.

Ali menilai rangkaian perubahan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika konfigurasi pemerintahan dan persiapan menghadapi kontestasi politik 2029.

"IndoStrategi Research Intelligence menilai perubahan di tubuh kepolisian dan kabinet tersebut perlu dicermati sebagai bagian dari dinamika pemerintahan sekaligus konsolidasi politik menuju 2029," tutupnya.

Berikut daftar pejabat yang dilantik Presiden Prabowo pada Kamis kemarin, 1 Oktober 2026:

1. Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam)
2. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM
3. Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
4. Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian
5. Nurcholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan
6. Lucky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan
7. Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian
8. Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
9. Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP)
10. Komjen Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reformasi Agraria Nasional
11. Drajad Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian
12. Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri
13. Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
14. Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Polisi Gadungan di Duren Sawit Diamuk Warga, Sempat Todongkan Pistol Mainan

Oleh Redaksi · 2 Okt, 08.37 WIB



BANDA ACEH - Mengaku anggota polisi sambil menodongkan senjata api ke pegawai apotek, pria berinisial JM (34) babak belur dikeroyok warga Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2026) siang.

Dalam video yang beredar, sejumlah warga begitu beringas memukuli pelaku dengan tangan kosong maupun benda tumpul.

Pria bertato di lengan kirinya itu awalnya datang ke lokasi seorang diri mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru.

Pelaku tersebut kemudian meminta uang kepada pegawai Apotek Kaisar sembari marah-marah.

Tak lama kemudian, pria berkaos hitam itu mengeluarkan senjata api dari dalam tasnya.

Sony salah satu pegawai Apotek menceritakan, pegawai apotek berusaha merebut senjata api dari tangan pelaku untuk menghindari penembakan.

"Terus semakin lama warga ramai berdatangan membantu mengamankan pelaku ini," ujarnya, Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, pelaku sempat melawan dan menyatakan dirinya anggota dari Polda Metro Jaya proses akan ditangkap warga.

Merasa sudah kesal, warga kemudian menghakimi pelaku dengan tangan kosong dan memukulnya pakai helm.

Wajah pelaku berdarah, tapi masih tetap berusaha ingin kabur dari lokasi kejadian. Tapi, warga berhasil mengamankan pelaku agar tidak melarikan diri usai aksi penodongan.

"Setelah dicek itu, dia bukan anggota polisi. Dia cuma ngaku-ngaku saja dan didalam boks sepeda motornya kami cek ada tramadol sama plastik klip diduga sabu," tegasnya.

Sony mengaku tidak tahu motif pelaku datang ke tokonya karena ketika tiba di lokasi sudah marah-marah di area parkir sepeda motor.

Ia sempat meminta pelaku untuk

masuk dan berbicara secara baik-baik, tapi ditolak JM.

"Terus pas dia sudah kami tangkap, kami hubungi polisi," imbuhnya.

Polisi amankan pelaku dari amukan warga

Sementara itu, Kapolsek Duren Sawit, Kompol Sutikno melanjutkan, pihaknya mendapatkan informasi dari warga adanya polisi gadungan saat menjalankan patroli.

Ia meminta anggotanya segera mendatangi lokasi kejadian guna menghindari main hakim sendiri yang dapat menyebabkan pelaku terluka parah.

"Kami tiba di sana ternyata ada pelaku yang ngaku anggota polisi sudah babak belur dihakimi massa," ucap Sutikno.

Pihak kepolisian akhirnya mengamankan pelaku dan memastikan pria tersebut bukan anggota Polri.

Sutikno memastikan pihaknya bakal memproses hukum pelaku karena sudah membuat resahkan warga Kecamatan Duren Sawit.

"Dia juga bukan warga Duren Sawit, mereka berasal dari Bekasi sesuai identitas pelaku ini," kata polisi berpangkat melati satu.

Mantan Kanit Reskrim Polsek Kramat Jati ini menyatakan, pihaknya menerapkan Pasal 482 Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang pemerasan dilakukan dengan todongan senjata tajam atau senjata api.

Ditemukan Tramadol di Tas Pelaku

Sutikno sendiri masih mendalami motif pelaku mendatangi apotek tersebut dan marah-marah pegawai hingga menodongkan senjata api.

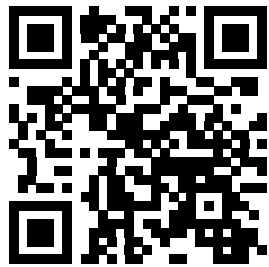
Ia menduga, ketika beraksi pelaku dalam pengaruh obat telarang karena didalam tasnya ditemukan obat jenis tramadol.

"Jadi pistol yang sempat ditodongkan itu mainan. Jadi bukan senjata api beneran, tetapi pistol mainan yang dibawa-bawa oleh si pelaku yang berinisial JM," tandasnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

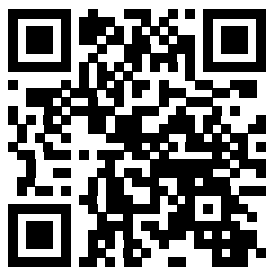
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Setelah Lapas Cibinong, Kini Harga Sultan Ada di Rutan Pondok Bambu

Oleh Redaksi · 2 Okt, 10.49 WIB



BANDA ACEH - - Setelah temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, kini dugaan praktik transaksional kembali mencuat di lingkungan pemsyarakatan. Kali ini, Ombudsman menemukan dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur, dengan nominal yang disebut mencapai Rp250 juta untuk penggunaan handphone.

Komisi XIII DPR mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemen Imipas) melakukan investigasi menyeluruh terhadap temuan tersebut. Investigasi diminta tidak hanya mengungkap pihak yang terlibat, tetapi juga menelusuri mekanisme dan aliran uang dalam praktik tersebut.

Anggota Komisi XIII DPR Prana Putra Sohe mengatakan temuan Ombudsman harus ditanggapi secara serius. Dia meminta Kemen Imipas membongkar dugaan pungli tersebut hingga ke akar.

"Temuan Ombudsman ini harus ditanggapi secara serius oleh Kemen Imipas. Harus ada investigasi menyeluruh untuk mengetahui bagaimana praktik ini bisa terjadi, siapa yang terlibat, dan bagaimana mekanismenya," kata Prana, dikutip Jumat (2/10/2026).

Temuan tersebut berasal dari inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman pada 15 September 2026. Dalam sidak itu, Ombudsman memperoleh informasi dari warga binaan mengenai dugaan pungutan untuk pindah kamar hingga penggunaan handphone di dalam Rutan Pondok Bambu.

Untuk pindah kamar, warga binaan disebut harus membayar Rp500.000. Sementara untuk dapat menggunakan handphone di dalam rutan, Ombudsman menerima informasi adanya pungutan hingga Rp250 juta.

"Pembayaran terhadap pungli menciptakan ruang penyalahgunaan kewenangan dan merusak proses pembinaan. Kemen Imipas harus membongkar praktiknya

sampai ke akar dan menelusuri aliran uangnya," ujarnya.

Prana meminta sanksi tegas tidak hanya diberikan kepada petugas lapangan apabila nantinya dugaan tersebut terbukti. Menurut dia, Kemen Imipas perlu melakukan audit internal untuk mengetahui apakah terdapat persoalan yang lebih sistemik.

"Telusuri siapa yang menerima, siapa yang memerintahkan, serta apakah ada pihak lain yang terlibat. Jangan hanya menindak pelaku di lapangan kalau ternyata ada persoalan yang lebih sistemik," katanya.

Selain dugaan pungli, Ombudsman juga menemukan persoalan lain di Rutan Pondok Bambu, seperti overcrowding, ketimpangan kondisi kamar, ketersediaan air bersih yang tidak layak, serta alat pemadam api ringan (APAR) yang kedaluwarsa.

"Persoalannya bukan hanya pungli, melainkan ketimpangan hunian, ketersediaan air bersih, hingga APAR kedaluwarsa.

Semua ini menyangkut pemenuhan hak dasar dan keselamatan warga binaan," ucap Prana.

Sebelumnya, anggota Ombudsman Syafrida Rasahan sebelumnya mengungkapkan, pihaknya mendapatkan informasi dari warga binaan mengenai pungutan untuk pindah kamar di Rutan Pondok Bambu.

"Bahwa kami mendapatkan informasi dari WB bahwa untuk biaya turun kamar, jadi untuk mereka pindah kamar ada pungli ada biaya yang harus mereka keluarkan sebesar Rp500.000," ujarnya.

Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pungutan untuk penggunaan handphone dengan nominal yang jauh lebih besar.

"Dan untuk masuk bisa mereka bisa menggunakan HP di Rutan Pondok Bambu, harus membayar sebesar Rp250 juta," lanjut dia

NASIONAL

Rullyandi Ahli Relawan Gibran Juga Laporkan Ketua MK Suhartoyo ke MKMK: Ilegal

Oleh Redaksi · 2 Okt, 18.42 WIB



BANDA ACEH - Ahli hukum tata negara yang dihadirkan Relawan Gibran 08 Nusantara, Muhammad Rullyandi, juga melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Laporan tersebut berkaitan dengan persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Laporan terhadap Suhartoyo terpisah dari laporan yang sebelumnya dilayangkan Rullyandi terhadap Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Laporan terhadap Suhartoyo diajukan lebih dulu pada Kamis (1/10/2026).

"Yang saya laporkan adalah berdasarkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2026. Itu yang buat adalah Ketua MK. Ya, dengan memaksakan sidang ini agar digelar dan itu saya katakan sidang ilegal, Pak Suhartoyo sebagai terlapor, hakim ketua terlapor," ujar Rullyandi, Jumat (2/10/2026).

Selain mempersoalkan pelaksanaan sidang PHPU Pilpres 2024 terkait ijazah Gibran, Rullyandi juga mempertanyakan status Suhartoyo sebagai Ketua MK. Dia bahkan menyebut jabatan Suhartoyo sebagai Ketua MK ilegal.

Menurut Rullyandi, hal itu berkaitan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang diputus pada 13 Agustus 2024. Dia menyatakan putusan tersebut

membatalkan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK.

Rullyandi menilai, setelah putusan tersebut, para hakim konstitusi seharusnya memilih Ketua MK dari kalangan hakim konstitusi lainnya. Namun, dia menuding Suhartoyo justru menetapkan dirinya sendiri sebagai Ketua MK.

"Putusan PTUN telah berkekuatan hukum tetap sejak 16 Desember 2024. Oleh karena itu, maka tidak ada Ketua MK definitif setelah putusan PTUN tersebut inkrah," tegas dia.

"Dalam posisi yang demikian, seharusnya Undang-Undang Dasar '45 mengamankan Ketua MK dipilih dari para hakim MK. Ternyata itu tidak dilakukan oleh seorang Suhartoyo. Dan dia menetapkan dirinya sebagai Ketua MK berdasarkan berita acara pleno yang sudah dibatalkan di waktu PTUN," lanjut dia.

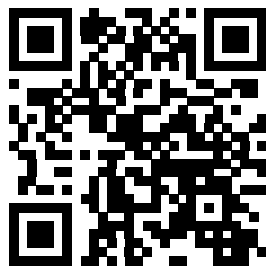
Atas dasar itu, Rullyandi meminta MKMK menindaklanjuti laporan yang diajukannya terhadap Suhartoyo, Saldi Isra, dan Arsul Sani.

"Itulah dasar saya untuk meminta kepada MKMK, Profesor Doktor I Dewa Gede Palguna selaku Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, untuk memproses lebih lanjut laporan saya kepada Wakil Ketua MK Profesor Saldi Isra, Ketua MK Pak Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani. Semoga ada keadilan yang berani di Ketua Majelis Kehormatan MKMK. Terima kasih," tandasnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

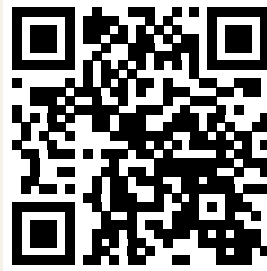
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Eks Wakapolri Jadi Kepala BRAN, Dedi Prasetyo Emangnya Bisa Apa?

Oleh Redaksi · 2 Okt, 08.27 WIB



BANDA ACEH— Penunjukan Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) membuka pertanyaan besar. Mampukah seorang mantan petinggi Polri menyelesaikan konflik agraria yang selama bertahun-tahun tidak kunjung tuntas?

Presiden Prabowo Subianto melantik Dedi sebagai Kepala BRAN di Istana Negara, Kamis (1/10/2026). Sebelumnya, Dedi menjabat Wakapolri sejak 2025.

BRAN bukan lembaga dengan pekerjaan ringan. Reforma agraria bersentuhan langsung dengan persoalan penguasaan tanah, konflik masyarakat dengan perusahaan, tumpang tindih izin, ketimpangan kepemilikan lahan, hingga dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan tanahnya.

Karena itu, publik berhak mempertanyakan modal dan rekam jejak Dedi untuk memimpin lembaga tersebut.

"Emangnya Dedi Prasetyo bisa apa?" ujar Dewan Pembina Komite Pejuang Pertanian Rakyat

(KPPR), Edison, saat menyoroti penunjukan mantan Wakapolri tersebut, Kamis (2/10/2026).

Menurut Edison, dirinya pesimistis Dedi mampu menyelesaikan konflik agraria karena persoalan tersebut memiliki kompleksitas yang jauh lebih rumit dibandingkan persoalan keamanan dan penegakan hukum yang selama ini menjadi ranah kepolisian.

"Emangnya Dedi Prasetyo bisa apa? Urusan konflik agraria? Kita pesimis. Sewaktu Wakapolri saja tidak bisa apa-apa, malah diberikan jabatan Ketua BRAN yang jelas kompleksitas konfliknya jauh lebih rumit," kata Edison.

Dirinya bahkan menilai publik perlu melihat dan menguji terlebih dahulu rekam jejak penanganan persoalan agraria ketika Dedi masih berada di jajaran Polri.

"Kita lihat saja, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa nantinya," ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan kritik Edison terhadap kapasitas Dedi, bukan kesimpulan bahwa Dedi pasti gagal. Sebab, BRAN

sendiri baru dibentuk dan Dedi baru dilantik sebagai kepala lembaga tersebut.

Dedi saat ini bahkan masih menyiapkan struktur organisasi BRAN. Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara serta Kementerian PAN-RB untuk menentukan pejabat yang akan mengisi struktur lembaga tersebut sebelum BRAN menjalankan tugas secara penuh.

Namun, bagi Edison, persoalan utama reforma agraria tidak berhenti pada urusan kelembagaan. Akar masalahnya, kata dia, adalah konflik penguasaan tanah, dugaan perampasan lahan, dan kriminalisasi petani.

"Yang paling intinya, masalah konflik agraria itu adalah perampasan lahan dan kriminalisasi. Sekarang selama ini pihak yang selalu mendukung aksi perampasan lahan itu siapa? Lalu yang sering kali mengkriminalisasi petani siapa?" tegas Edison.

Pertanyaan tersebut penting dibuka secara transparan. Berapa banyak laporan masyarakat terkait

konflik agraria yang masuk ke kepolisian? Berapa yang naik ke tahap penyidikan? Berapa yang berakhir di pengadilan? Berapa yang akhirnya memberikan kepastian hak kepada masyarakat? Jangan sampai negara sibuk membentuk lembaga baru, tetapi gagal membuka kembali tumpukan konflik lama.

Data yang dihimpun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan diberitakan Mongabay mencatat ribuan orang menjadi korban konflik agraria dalam periode 2004-2025, termasuk korban kriminalisasi. Data tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria bukan persoalan kecil yang bisa diselesaikan hanya melalui pembentukan lembaga baru.

Edison meminta Dedi tidak hanya berbicara mengenai pembentukan struktur BRAN, tetapi segera membuka basis data konflik agraria secara nasional.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Canberra Akui Tak Temukan Dokumen Gibran

Oleh Redaksi · 2 Okt, 15.01 WIB



BANDA ACEH - - Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, Nur Aini Ariyanti, menyatakan tidak menemukan dokumen yang berkaitan dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di KBRI Singapura.

Keterangan tersebut disampaikan Nur Aini saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara gugatan ijazah Gibran di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (2/10).

Dalam persidangan, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Nur Aini menjelaskan apakah KBRI Singapura memiliki catatan mengenai jenjang pendidikan yang pernah ditempuh Gibran selama berada di negara tersebut.

"Bu Atase, Ibu bisa menambahkan enggak tambahkan record-record apa yang dimiliki di kedutaan berkaitan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh Pak Gibran?" tanya Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Nur Aini mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap arsip yang tersimpan di KBRI Singapura. Namun, pencarian itu tidak menemukan dokumen pendidikan atas nama Gibran.

"Mohon izin, Yang Mulia, setelah kami menelusuri dokumen yang ada, kami tidak menemukan adanya dokumen yang disimpan di KBRI, Yang Mulia," jawab Aini.

Saldi kemudian memperjelas kembali cakupan dokumen yang dimaksud. Ia menyinggung riwayat pendidikan Gibran yang disebut-sebut berkaitan dengan jenjang pendidikan setara sekolah

menengah atas (SLTA) di Singapura.

"Baik, ketika masuk maupun setelah meninggalkan Singapura, ya? Karena ini isunya ada di sekitar pendidikan yang sederajat dengan SLTA, Bu Atase. Jadi enggak ada dokumen apa pun ya di kedutaan, ya?" tanya Saldi.

"Betul," timpal Aini.

Dalam persidangan yang sama, Atase Pendidikan KBRI Canberra, Yuli Rahmawati, turut memberikan keterangan mengenai arsip pendidikan Gibran di Australia.

Saldi menegaskan, jenis dokumen yang biasanya dimiliki KBRI, khususnya Atase Pendidikan, terkait proses pendidikan warga negara Indonesia di luar negeri. Ia mencontohkan dokumen seperti sertifikat, waktu masuk dan keluar, maupun catatan mengenai proses pendidikan yang dijalani seseorang.

"Dokumen-dokumen apa sih yang dimiliki di KBRI, terutama di atase pendidikan? Misalnya soal sertifikat, masuk kapan, keluar kapan, apa yang diketahui di kedutaan kita berkaitan dengan proses pendidikan yang berlangsung, yang dilakukan atau yang diikuti Pak Gibran?" tanya Saldi.

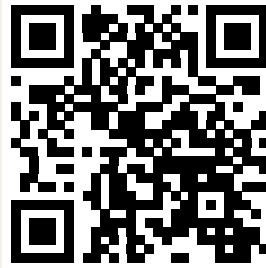
Yuli kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan penelusuran arsip KBRI Canberra, pihaknya tidak menemukan dokumen permohonan pendidikan yang diajukan Gibran.

"Baik Majelis Hakim. Berdasarkan penelusuran arsip, baik secara hard copy maupun soft copy. Kami tidak memiliki pengajuan permohonan dari Pak Gibran. Terima kasih," pungkas Yuli

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

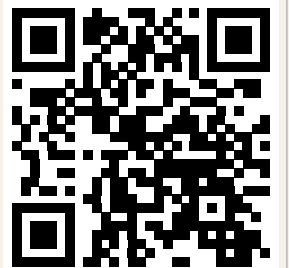
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Viral Ramzi Curhat Kapolri Baru Suyudi Ario Seto Jadi Imam Sholat Maghrib usai Dilantik

Oleh Redaksi · 2 Okt, 12.20 WIB



BANDA ACEH - Belum lama menyandang pangkat jenderal bintang empat dan resmi menjadi Kapolri, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto langsung mencuri perhatian lewat momen sederhana. Bukan saat berada di Istana Negara, melainkan ketika menjalankan ibadah Sholat Maghrib.

Momen tersebut diungkap presenter sekaligus aktor Ramzi melalui unggahan Instagram. Ramzi mengabarkan bahwa dirinya melaksanakan Sholat Maghrib yang diimami langsung oleh Suyudi Ario Seto.

Yang membuat momen tersebut semakin menarik, kejadian itu berlangsung pada hari yang sama setelah Suyudi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kamis (1/10/2026).

Ramzi pun mengungkap rasa syukurnya bisa melaksanakan ibadah bersama Kapolri yang baru saja resmi dilantik tersebut.

“Sholat Maghrib hari ini Alhamdulillah diimami pak kapolri Jenderal Pol Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si,” ungkap Ramzi, dikutip Jumat (2/10/2026).

Unggahan tersebut disertai foto Suyudi setelah menunaikan Sholat Maghrib. Foto itu pun memperlihatkan sisi berbeda dari sosok Suyudi yang sebelumnya menjadi pusat perhatian dalam prosesi pelantikan di Istana Negara.

Dalam foto yang dibagikan Ramzi, Suyudi terlihat duduk setelah menjalankan ibadah. Dia mengenakan kemeja berwarna abu-abu yang dipadukan dengan celana abu-abu gelap.

Suyudi juga tampak mengenakan peci putih. Dalam posisi

duduk, dia terlihat berdoa dan berdzikir sembari memegang tasbih.

Tidak ada seragam dinas maupun suasana formal dalam foto tersebut. Suyudi justru terlihat dalam penampilan sederhana setelah menjalankan Sholat Maghrib.

Momen itu menjadi menarik karena berlangsung tak lama setelah dirinya menjalani prosesi penting dalam kariernya sebagai anggota Polri.

Sebelumnya, Suyudi resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pelantikan tersebut menandai dimulainya tugas Suyudi sebagai orang nomor satu di institusi Polri. Dia menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya memimpin Korps Bhatyankara.

Dalam prosesi tersebut, Suyudi mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo. Setelah resmi dilantik, dia juga menerima tanda pangkat bintang empat dan tongkat komando sebagai bagian dari prosesi pergantian kepemimpinan Polri.

Namun, di hari yang sama, Ramzi justru memperlihatkan momen Suyudi dalam suasana yang jauh berbeda.

Alih-alih berada dalam agenda kenegaraan, Suyudi terlihat khuyuk setelah menjadi imam Sholat Maghrib.

Unggahan Ramzi tersebut sontak menjadi perhatian karena memperlihatkan sisi personal Suyudi setelah resmi menduduki jabatan tertinggi di Polri.

Terlebih, momen tersebut terjadi tepat setelah Suyudi melalui rangkaian prosesi pelantikan sebagai Kapolri baru

NASIONAL

Hakim MK Heran Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran

Oleh Redaksi · 2 Okt, 18.44 WIB



BANDA ACEH — Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan penggunaan frasa “memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan” dalam Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Surat tersebut diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2019.

Pertanyaan itu disampaikan Arsul dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (2/10/2026).

Arsul menilai, penggunaan frasa tersebut menimbulkan persoalan lantaran dokumen penyetaraan pada dasarnya berkaitan dengan ijazah atau sertifikat pendidikan, bukan sekadar pengetahuan.

“Ini agak bersayap terus terang bagi kami untuk memahami. Karena yang bapak setarakan itu adalah pengetahuan, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan, ini makanya KPU agak puyeng,” kata Arsul.

Arsul kemudian merujuk Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur mengenai surat keterangan penyetaraan.

Menurut Arsul, ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dokumen penyetaraan menerangkan kesetaraan ijazah atau sertifikat, bukan pengetahuan seseorang.

“Yang bapak setarakan itu adalah pengetahuan,” ujarnya.

Arsul bahkan berseloroh majelis hakim perlu mengerutkan dahi untuk memahami maksud frasa dalam surat tersebut.

“Tapi karena bunyinya adalah itu tadi memiliki pengetahuan setara ini, kami ini harus mengerutkan dahi ini Pak Dirjen. Mungkin juga harus istikharah dulu ini apa itu ya makna dari ini,” kata Arsul.

Arsul kemudian membandingkan surat penyetaraan pendidikan menengah tersebut dengan dokumen yang diterbitkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) terkait pendidikan tinggi Gibran di luar negeri.

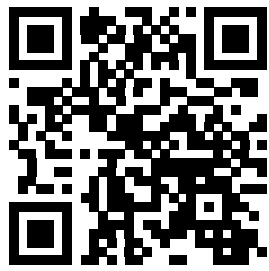
Menurutnya, surat dari Kemenristekdikti lebih mudah dipahami karena secara eksplisit menyebut ijazah pendidikan tinggi Gibran yang diperoleh di luar negeri setara dengan pendidikan tinggi di Indonesia.

“Kalau yang dikeluarkan yang ini (Kemenristek), ini gampang diketahui, setara, setara apa yang setara? Ijazahnya,” pungkas Arsul

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

KPK Buka Peluang Segera Periksa Nusron Wahid di Kasus ATR/BPN

Oleh Redaksi · 2 Okt, 10.23 WIB



BANDA ACEH -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk dimintai keterangan dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa tim penyidik terbuka untuk memeriksa Nusron Wahid, terlebih karena terdapat empat tersangka pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron dan memiliki peran signifikan dalam perkara tersebut.

"Ya tentunya penyidik terbuka peluang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pak Menteri, saudara NW, terlebih dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ada empat orang kepercayaan yang merupakan pihak-pihak di

luar struktur Kementerian ATR/BPN, tapi kemudian punya peran yang cukup signifikan dalam alur perintah ataupun alur penerimaan uang," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 2 Oktober 2026.

Budi menerangkan, peran keempat orang kepercayaan tersebut akan didalami penyidik, termasuk kaitannya dengan alur perintah dan aliran dana. Selain itu, KPK juga akan mengonfirmasi hasil pengeledahan di tiga ruangan Direktur Jenderal serta sejumlah ruangan direktorat terkait kepada pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan pengetahuan atas temuan tersebut.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026, di wilayah Jabodetabek yang mengamankan 19 orang serta barang bukti uang tunai senilai total

kurang lebih Rp106,3 miliar dalam berbagai pecahan mata uang.

Setelah menemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan langsung menahan mereka sejak 15 September 2026.

Delapan tersangka tersebut meliputi Lampri (Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN), Sontang Coin Manurung (Kepala Kantah Kabupaten Bogor I), Adrianto Pitojo Adi (Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk), serta lima pihak swasta yaitu Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi. Sejumlah nama swasta di antaranya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Dalam konstruksi perkara, kasus ini bermula dari pengurusan perpanjangan serta pemecahan Hak

Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola oleh PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor yang sempat bersengketa dan diblokir.

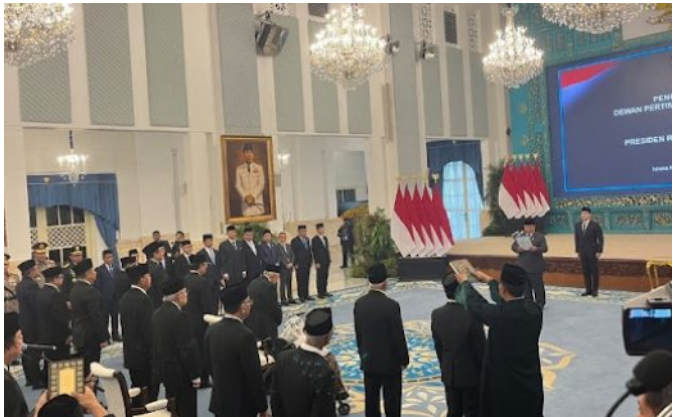
KPK menduga terjadi permintaan fee sebesar Rp1,5 miliar melalui perantara dan orang kepercayaan menteri agar blokir tersebut dapat dibuka serta proses penerbitan sertifikat dilanjutkan.

Selain dugaan suap pengurusan HGB Summarecon, KPK juga mendalami kasus serupa pada PT Bela Parahyangan, serta menemukan indikasi penerimaan gratifikasi terkait mutasi-promosi jabatan dan pelayanan pertanahan lainnya dengan aliran dana mencapai miliaran Rupiah yang kini masih terus dikembangkan oleh tim penyidik.

NASIONAL

Prabowo Lantik 24 Anggota Wantimpres, Pratikno Jadi Ketuanya

Oleh Redaksi · 2 Okt, 17.00 WIB



BANDA ACEH -Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.

Berdasarkan pantauan RMOL, prosesi pelantikan dimulai sekitar pukul 15.30 WIB. Presiden Prabowo tiba di lokasi acara didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Setibanya di tempat pelantikan, Prabowo langsung memimpin prosesi pengucapan sumpah jabatan bagi jajaran Wantimpres yang baru.

Di hadapan Presiden Prabowo, berjejer 24 pejabat yang dilantik sebagai anggota Wantimpres.

Selain Pratikno sebagai Ketua dan Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, sejumlah tokoh yang dilantik di antaranya Shinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Bambang Soesatyo, Agum Gumelar, Budi Gunawan, Chairul Tanjung, Salim Segaf Aljufri, Anwar Iskandar, Said Aqil Siradj, Yahya Cholil Staquf, hingga Philip Kuncoro Wijaya.

Jajaran Wantimpres juga diisi Budi Tanuwibowo, Ida Bagus Purwalaksana, Soekarwo, Jusuf Hamka, Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, Yusuf Wanandi, Margarito, Rocky Gerung, Mohamad Hatta, Muham-

mad Qodari, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Setelah itu, dibacakan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden sebagai dasar hukum pengangkatan para anggota Wantimpres.

Selanjutnya, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti seluruh anggota Wantimpres.

"Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya," kata Presiden.

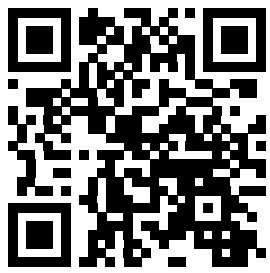
Usai pengucapan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Pratikno di hadapan Presiden Prabowo.

Prosesi kemudian ditutup dengan sesi pemberian ucapan selamat dari Presiden dan sejumlah menteri yang hadir kepada para anggota Wantimpres yang baru dilantik.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Sebelum Diusir Hakim, Rullyandi Cabut Pernyataan Ketua MK Ilegal: Saya dalam Kondisi Tertekan

Oleh Redaksi · 2 Okt, 08.06 WIB



BANDA ACEH - Ahli yang diajukan Militan Gibran 08 Nusantara, Muhammad Rullyandi, mencabut pernyataannya yang pernah menyebut persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2024 terkait syarat administrasi pendidikan Wakil Presiden 2024 adalah sidang ilegal.

Pencabutan itu disampaikan setelah Majelis Hakim mempertanyakan konsistensi Rullyandi yang tetap bersedia menjadi ahli dalam perkara yang sebelumnya dia nilai ilegal. Mulanya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyinggung pernyataan Rullyandi dalam sebuah tayangan diskusi yang menyebut persidangan perkara tersebut ilegal dan Ketua MK saat ini ilegal.

"Saya kebetulan menonton, melihat, talkshow Anda yang ada juga Pak Dr. Refly Harun, saya lihat di sebuah televisi, yang mengatakan bahwa persidangan

perkara ini ilegal, Ketua Mahkamah Konstitusi ilegal," kata Arsul dalam persidangan, Kamis (1/10/2026).

Arsul kemudian mempertanyakan alasan Rullyandi bersedia menjadi ahli dalam perkara yang menurut pandangannya tidak sah.

"Kalau persidangan perkara ini ilegal, ya, untuk apa juga Anda menjadi ahli dalam perkara ini? Wong persidangannya ilegal menurut Anda, kok," ujarnya.

Hakim konstitusi yang memimpin persidangan, Saldi Isra lalu meminta Rullyandi mencabut pernyataan tersebut apabila ingin memberikan keterangan sebagai ahli.

"Sebelum dijawab, Anda harus mencabut pernyataan itu. Kalau tidak, Anda tidak bisa menggunakan apa, keahlian Saudara di sini. Karena Anda tidak bisa hadir di sidang yang Anda tuduh ilegal ini," kata Saldi.

Menanggapi hal itu, Rullyandi mengatakan pernyataannya merupakan bentuk kritik terhadap MK. Dia juga menjelaskan pandangannya terkait legalitas Ketua MK saat ini yang menurutnya berkaitan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai pemilihan Ketua MK.

Namun, setelah diminta majelis, Rullyandi akhirnya mencabut pernyataannya mengenai sidang ilegal.

"Saya mencabut di ruang persidangan ini, hanya di ruang persidangan ini keterangan saya mengenai sidang ilegal karena saya dalam kondisi tertekan. Demi kepentingan bangsa dan negara saya ingin menyampaikan pandangan hukum saya terhadap persidangan ini dan saya menghormati apa yang diminta oleh Majelis Hakim," ujarnya.

Meski telah mencabut pernyataannya, Majelis Hakim kemudian menskors sidang untuk bermusyawarah.

Setelah sidang dibuka kembali, Saldi menyampaikan keputusan bahwa Rullyandi tidak diperkenankan menyampaikan keterangan lisan.

"Kami memutuskan bahwa yang diterima adalah keterangan tertulisnya dan tidak menyampaikan keterangan lisan. Terima kasih dan tidak boleh menyampaikan apa-apa lagi. Anda tidak boleh lagi, cukup," kata Saldi.

Rullyandi menerima keputusan tersebut dan menyatakan menghormati putusan majelis. "Baik, kalau memang seperti itu kami mengerti prinsip-prinsip negara hukum. Terima kasih," ujarnya.

Diketahui, perkara ini diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya yang mempersoalkan pemenuhan syarat administrasi pendidikan Gibran saat pencalonan pada Pilpres 2024

NASIONAL

Anwar Usman Ogah Komentar Soal Gugatan Ijazah Gibran

Oleh Redaksi · 2 Okt, 18.34 WIB



BANDA ACEH -Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memilih tidak berkomentar mengenai gugatan yang berkaitan dengan ijazah Wakil Presiden sekaligus keponakannya Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Anwar usai dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.

Saat ditanya wartawan mengenai gugatan tersebut, Anwar menolak memberikan tanggapan karena dirinya sudah berada di luar lembaga peradilan tersebut.

"Maaf, no comment kalau itu. Biarkan aja mereka yang menyelesaikan. saya kan udh di luar. Gitu ya," kata Anwar.

Anwar mengatakan statusnya sebagai mantan hakim juga menjadi alasan dirinya tidak ingin memberikan komentar mengenai perkara tersebut.

Menurutnya, apapun pernyataan yang diberikan dapat menjadi

bentuk intervensi secara tidak langsung.

"Iya, walaupun mantan hakim ya nggak boleh saya juga... Walaupun mantan hakim nggak boleh. Itu intervensi secara tidak langsung kalau saya memberikan tanggapan," ujarnya.

Anwar juga menegaskan tidak pernah memberikan konsultasi kepada Gibran terkait persoalan tersebut. Dia mengaku jarang bertemu dengan Wakil Presiden dan menyatakan dirinya tidak ingin terlibat dalam urusan Politik.

"Oh nggak ada, saya jarang ketemu. Berapa bulan ini baru ketemu tadi aja nih. Nggak ada. Dan saya sendiri nggak mau. Saya kan bukan orang politik," tegasnya.

Ketika ditanya mengenai pertemuannya dengan Gibran dan Prabowo sesuai pelantikan, Anwar menyebut tidak ada pembicaraan khusus.

"Nggak ada, salaman aja," kata Anwar.

NASIONAL

Jusuf Hamka Ungkap Alasan Terima Tawaran Jadi Anggota Wantimpres

Oleh Redaksi · 2 Okt, 16.57 WIB



BANDA ACEH -Pengusaha Jusuf Hamka mengaku kaget saat mendapat tawaran menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Hal itu disampaikan Jusuf Hamka saat tiba di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026, menjelang pelantikan sejumlah pejabat oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan tawaran tersebut disampaikan melalui telepon Sekretaris Kabinet pada Jumat pagi sekitar pukul 06.35 WIB.

"Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya," ujar Jusuf Hamka.

Menurutnya, tawaran tersebut langsung diterima karena menyangkut pengabdian kepada negara.

"Kalau untuk Merah Putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk Merah Putih harga mati," katanya.

Jusuf Hamka mengaku belum mengetahui komposisi lengkap Wantimpres. Ia menyebut sejumlah nama yang didengarnya, di antaranya Hatta Rajasa, Agung Laksono, Budi Gunawan, dan beberapa tokoh lainnya.

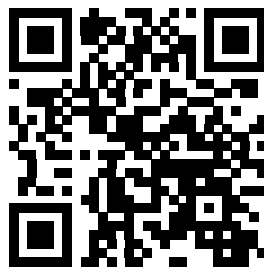
"Kalau sudah diminta oleh negara, tidak boleh ditolak. Kita harus berbakti," ujar Jusuf Hamka.

Selain Hamka, sejumlah pejabat yang akan dilantik sebagai Wantimpres telah berdatangan di antaranya mantan Menko PMK Pratikno, Hatta Rajasa, hingga Rocky Gerung

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Hakim MK ke Eks Ketua KPU: Pertanyaan Kami Tak Seberat di Alam Kubur Nanti

Oleh Redaksi · 2 Okt, 10.40 WIB



BANDA ACEH - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti kehadiran mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 terkait persyaratan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, Hasyim dihadirkan KPU sebagai saksi dalam sidang, Kamis (2/10/2026).

Sejumlah hakim MK melontarkan kelakar kepada Hasyim. Salah satunya Hakim Arsul Sani berke-lakar bahwa pertanyaan untuk Hasyim dalam sidang ini tidak seberat pertanyaan yang akan ditanyakan malaikat di alam kubur.

"Walaupun pertanyaannya berat-berat, saya yakin ini masih jauh lebih ringan daripada pertanyaan Munkar dan Nakir di alam kubur nanti, Pak Hasyim. Anggap

saja ini pemanasan (pemanasan) saja lah, pada akhirnya nanti kita semua akan ditanya Munkar Nakir," kata Arsul.

Sementara itu, Hakim MK lainnya, Enny Nurbaningsih juga menyoroti penampilan Hasyim yang terlihat lebih kurus.

"Pak Hasyim kok tambah kurus kayaknya? Banyak pikiran ya Pak?" tanya Enny.

"Justru sekarang tanpa beban Bu, justru," kata Hasyim.

Dalam sidang ini, Hasyim Asy'ari mengungkap alasan pihaknya tidak melakukan klarifikasi ulang terhadap dokumen penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat proses pencalonan sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

Hasyim menjelaskan, KPU berpegang pada prinsip hukum administrasi yang menganggap doku-

men yang diterbitkan instansi pemerintah berwenang sebagai dokumen yang sah dan benar selama tidak ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya.

Menurutnya, terdapat dua dokumen resmi yang menjadi dasar KPU dalam menilai pemenuhan syarat pendidikan Gibran. Dokumen pertama berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan menengah yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdas-men) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.

Surat tersebut menyatakan lulusan Grade 12 UTS Insearch Sydney tahun 2006 setara dengan lulusan SMK program keahlian Akuntansi dan Keuangan.

Sementara dokumen kedua adalah Surat Keputusan Direktur

Jenderal Pembelajaran dan Kemasasiswaan mengenai hasil penilaian kesetaraan ijazah pendidikan tinggi luar negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi berdasarkan dua dokumen ini, KPU membuat penilaian atau meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen. Dalam pandangan kami, secara hukum administrasi semua dokumen yang diterbitkan lembaga harus kami anggap benar kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya," kata Hasyim.

Berdasarkan dua dokumen tersebut, KPU menyimpulkan syarat minimal pendidikan yang diwajibkan bagi Gibran telah terpenuhi. Hasil penilaian itu kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan penelitian administrasi pencalonan

NASIONAL

Sidang MK, KBRI Singapura dan Australia Akui Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Oleh Redaksi · 2 Okt, 12.23 WIB



BANDA ACEH - Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura dan Canberra, Australia mengaku tidak memiliki jejak dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (2/10/2026).

Atase Pendidikan KBRI Singapura Nuraini Hariyanti mengatakan, pihaknya telah menelusuri dokumen yang tersimpan di KBRI Singapura. Namun, tidak menemukan arsip yang berkaitan dengan pendidikan Gibran.

"Bu Atase, Ibu bisa menambahkan nggak, tambahkan record-record apa yang dimiliki di kedutaan berkaitan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh Pak Gibran?" tanya Hakim Konstitusi Saldi Isra.

"Mohon izin Yang Mulia, setelah kami menelusuri dokumen yang ada, kami tidak menemukan adanya dokumen yang disimpan di KBRI, Yang Mulia," jawab Aini.

Saldi kemudian memastikan apakah tidak ada dokumen pendidikan Gibran, baik saat masuk maupun setelah meninggalkan Singapura.

"Baik, ketika masuk maupun setelah meninggalkan Singapura, ya? Karena ini isunya ada di sekitar pendidikan yang sederajat dengan SLTA, Bu Atase. Jadi nggak ada dokumen apa pun ya di kedutaan, ya?" tanya Saldi.

"Betul," jawab Aini.

Hal serupa disampaikan Atase Pendidikan KBRI Canberra Yuli Rahmawati. Dia mengatakan KBRI Canberra juga tidak memiliki dokumen berkaitan dengan pendidikan Gibran.

Yuli mengatakan, pihaknya juga tidak pernah menerima permohonan yang berkaitan dengan jejak pendidikan Gibran.

"Dokumen-dokumen apa sih yang dimiliki di KBRI, terutama di atase pendidikan? Misalnya soal sertifikat, masuk kapan, keluar kapan, apa yang diketahui di kedutaan kita berkaitan dengan proses pendidikan yang berlangsung, yang dilakukan atau yang diikuti Pak Gibran?" tanya Saldi.

"Baik Majelis Hakim. Berdasarkan penelusuran arsip, baik secara hard copy maupun soft copy. Kami tidak memiliki pengajuan permohonan dari Pak Gibran. Terima kasih," jawab Yuli

NASIONAL

Rocky Gerung Dilantik Jadi Anggota Wantimpres, Tunduk Hormat kepada Prabowo

Oleh Redaksi · 2 Okt, 17.04 WIB



BANDA ACEH - Rocky Gerung resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Nama Rocky menjadi salah satu yang mencuri perhatian dalam jajaran Wantimpres yang dilantik Prabowo. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara bersama sejumlah tokoh lainnya.

Sebelum mengikuti prosesi pelantikan, Rocky terlihat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan dengan mengenakan setelan jas.

Momen kedatangan Rocky turut menjadi perhatian. Dia kemudian

mengikuti rangkaian acara pelantikan hingga pengucapan sumpah jabatan anggota Wantimpres.

Rocky juga terlihat menunduk memberikan gestur hormat kepada Presiden Prabowo dalam rangkaian momen pelantikan.

Pelantikan Rocky sebagai anggota Wantimpres menandai masuknya tokoh tersebut ke dalam jajaran lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Selain Rocky, sejumlah tokoh lain juga dilantik dalam jajaran Wantimpres baru. Pratikno dipercaya menjadi Ketua Wantimpres, sementara Muhammad Qodari menjadi sekretaris

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Eks Ketua KPU Hasyim Asy'ari Klaim Tak Punya Niat Loloskan Gibran sebagai Cawapres

Oleh Redaksi · 2 Okt, 10.44 WIB



BANDA ACEH - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dihadirkan ke dalam sidang lanjutan gugatan pendidikan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Kamis (1/10) malam.

Hasyim menjelaskan soal hadirnya Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang dipersiapkan Pemohon, dalam hal ini Denny Indrayana.

Adapun, Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 itu berbunyi "Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan

telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi."

"Jadi munculnya gagasan ini, itu pada saat rapat koordinasi dengan para pihak, terutama dari Kementerian Pendidikan," kata Hasyim saat memberikan keterangan.

Hasyim menjelaskan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) saat itu selalu mengingatkan rumusan tersebut. Menurutnya, munculnya frasa itu karena banyak orang yang hendak menjadi calon legislatif (caleg) tidak bisa menunjukan surat penyetaraan perguruan tinggi.

"Karena pengalaman yang sudah-sudah, banyak orang yang mau menjadi caleg itu mengajukan permohonan surat penyetaraan perguruan tinggi, tapi kemudian untuk jenjang pendidikan sebe-

lumnya tidak dapat menunjukan," ucapnya.

Ia menuturkan, jika pendidikan menengah atas atau sederejat cukup menyerahkan surat keterangan. Sementara, lulusan

perguruan tinggi di luar negeri menyerahkan surat keputusan atau SK.

"Jadi kalau ada SK dari kementerian yang statusnya menyetarakan seseorang telah tamat pendidikan tinggi, maka kemudian cukup itu saja yang digunakan sebagai syarat," tegasnya.

Melalui penjelasan tersebut, lanjut Hasyim, menegaskan bahwa tidak ada motif untuk memuluskan syarat Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

"Jadi tidak ada niat, tidak ada pandangan, tidak ada apa-apa

motif untuk meloloskan seseorang atau memudahkan seseorang dalam situasi ini," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Denny Indrayana mempersoalkan proses penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dalam waktu kurang dari 24 jam.

Ia mempertanyakan dokumen kelulusan yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut. Gugatan itu teregistrasi dengan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Persoalan tersebut berkaitan dengan Pasal 1 angka 7 Permen-dikbud Nomor 29 Tahun 2014 mengenai dokumen pendukung penyetaraan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma

NASIONAL

Pratikno Benarkan Bakal Dilantik Wantimpres Siang Ini di Istana

Oleh Redaksi · 2 Okt, 14.44 WIB



BANDA ACEH -Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno merapat ke Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026, menjelang agenda pelantikan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Berdasarkan pantauan RMOL, Pratikno tiba di kompleks Istana Kepresidenan bersama sang istri. Ia tampak mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan dasi biru, busana yang lazim dikenakan dalam agenda resmi pelantikan pejabat negara.

Kedatangan Pratikno semakin menguatkan informasi mengenai rencana penunjukannya sebagai Ketua Wantimpres.

Tiba di halaman istana sekitar pukul 14.00 WIB, Pratikno membenarkan bahwa dirinya mendapat undangan pelantikan Wantimpres.

"Iya ini saya diundang untuk pelantikan apa Watimpres ya," kata Pratikno.

Ketika ditanya apakah dirinya akan dilantik sebagai ketua, Pratikno mengaku belum menerima salinan Keputusan Presiden (Kepres).

"Ya nanti kita lihat saya belum memperoleh salinan keppres," ujarnya.

Pratikno juga mengungkapkan bahwa proses dirinya ditawarkan jabatan tersebut telah berlangsung cukup lama.

"Ya prosesnya sudah anu lah, udah cukup lama beberapa kali disampaikan," tuturnya.

Selain Pratikno, sejumlah nama tokoh nasional juga disebut masuk dalam jajaran Wantimpres yang akan dilantik Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan informasi yang beredar, Hatta Rajasa disebut akan menduduki posisi Wakil Ketua, sementara Chairul Tanjung, Jusuf Hamka, Budi Gunawan, Djamarie Chaniago, KH Said Aqil Siradj, dan Rocky Gerung disebut sebagai anggota.

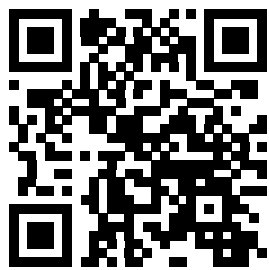
Pengisian kembali struktur Wantimpres menjadi perhatian setelah lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden tersebut belum memiliki kepengurusan definitif sejak dimulainya pemerintahan Prabowo Subianto.

Kondisi tersebut berlangsung di tengah perubahan konfigurasi pemerintahan setelah Prabowo melakukan perombakan kabinet besar-besaran pada Kamis, 1 Oktober 2026.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

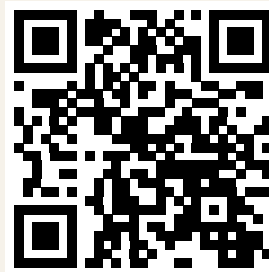
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Heboh Pengadaan Sprei dan Sarung Bantal Rp9 Miliar, BGN Buka Suara

Oleh Redaksi · 2 Okt, 08.19 WIB



BANDA ACEH - Pengadaan perlengkapan tidur Badan Gizi Nasional (BGN) senilai Rp9,097 miliar menjadi sorotan setelah muncul dalam daftar pengadaan pemerintah tahun 2025.

Paket bernama “Sprei dan Sarung Bantal untuk Ganti” itu tercatat dalam sistem INAPROC sebagai pengadaan barang oleh Kantor Pusat Badan Gizi Nasional. Nilainya mencapai Rp9.097.618.000 dengan penyedia PT Panca Karya Unggul Abadi.

Berdasarkan data transaksi pengadaan pemerintah, paket dengan kode 11639671 dan kode RUP 58114395 tersebut bersumber dari APBN dan dilakukan melalui E-Katalog Versi 5.0 dengan metode E-Purchasing.

Tahapan pengadaan saat ini tercatat telah masuk fase kontrak

dengan status “Melakukan Pengiriman dan Penerimaan”. INAPROC juga mencatat paket tersebut sebagai pengadaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta melibatkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Nama paket “Sprei dan Sarung Bantal untuk Ganti” menunjukkan pengadaan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan penggantian perlengkapan tidur. BGN menyebut fasilitas seperti itu merupakan bagian dari kebutuhan pendukung operasional, termasuk ruang istirahat petugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pengadaan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. BGN pun memberikan klarifikasi terkait waktu pelaksanaan dan pihak yang bertanggung jawab atas proses tersebut.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan paket pengadaan itu dilakukan pada 2025, sebelum Sudaryono menjabat sebagai Kepala BGN.

“Pengadaan sprei dan sarung bantal yang lagi heboh di media sosial, perlu kami sampaikan bahwa itu terjadi di tahun 2025. Jadi terjadi di tahun lalu dan pada saat itu kepala badannya adalah kepala badan yang lama, bukan di masa kepemimpinan Bapak Sudaryono selaku Kepala Badan Gizi Nasional,” ujar Tysa dalam keterangan resmi BGN yang diunggah melalui akun Instagram resmi BGN, Rabu (30/9/2026).

Tysa juga menyebut pengadaan tersebut saat ini masuk dalam materi perkara hukum yang sedang berjalan. Karena itu, ia meminta publik menunggu proses

yang dilakukan aparat penegak hukum.

“Berkaitan dengan sarung bantal dan sprei tersebut, saat ini juga itu menjadi salah satu materi perkara hukum yang sedang berjalan yang kita sama-sama tahu di luar sana,” jelasnya.

BGN turut meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan informasi yang beredar dan melakukan pengecekan terhadap data sebelum menyebarkannya.

“Kami minta kepada teman-teman di luar sana, kalau ingin memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sesuatu hal apapun itu, please cross-check dulu, benar nggak datanya, benar nggak informasinya, supaya enggak jadi fitnah,” pungkas Tysa.

NASIONAL

Rocky Gerung: Saya Cuma Pindah ke Dalam, Pandangan Tetap Radical Break

Oleh Redaksi · 2 Okt, 18.38 WIB



BANDA ACEH - Akademisi Rocky Gerung menegaskan sikap dan pandangannya tidak berubah meski kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dia menyebut hanya berpindah posisi dari luar ke dalam pemerintahan.

Rocky dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

“Ya kan cuman pindah, saya cuma pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break. Udah,” kata Rocky usai pelantikan.

Dia menjelaskan, Wantimpres memiliki fungsi etis dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden, bukan menjalankan tugas teknis pemerintahan.

“Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa dewan pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat eks-eskes dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya

sesuai dengan visi presiden,” ujarnya.

Rocky menegaskan, Wantimpres harus bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Dia membedakan sikap kritis dalam memberikan pertimbangan dengan sekadar melontarkan kritik.

“Dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik ya, beda tuh. Kritis terhadap kebijakan tuh,” katanya.

Menurut Rocky, tugas Wantimpres adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden, sedangkan keputusan akhir tetap berada di tangan kepala negara.

“Tugas dewan adalah mengingat dan menimbang dan memutuskan. Penetapannya ada pada presiden. Jadi kita membuat pertimbangan, user-nya adalah Bapak Presiden,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Rocky kembali menegaskan bergabungnya dia ke dalam pemerintahan tidak mengubah sikapnya.

“Tetap radikal ya,” tegas Rocky

NASIONAL

Pelantikan Wantimpres: Eks Ketua MK Anwar Usman Tiba di Istana, Dikontak Raffi Ahmad

Oleh Redaksi · 2 Okt, 14.49 WIB



BANDA ACEH - - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Saat ditanya apakah dia akan dilantik menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Anwar mengaku tidak tahu.

“Mungkin, ya nggak tahu juga saya,” kata Anwar.

Anwar mengaku diundang sejak tadi malam sekitar pukul 21.00 WIB. Anwar diundang Raffi Ahmad yang merupakan Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

“Saya sebut namanya saja, saya dikontak Raffi Ahmad, diundang untuk datang ke sini,” ujar Anwar.

Saat ditanya apakah dirinya siap menjabat Wantimpres, Anwar

mengaku orang yang taat dengan konstitusi.

“Saya jadikan lahan untuk beribadah,” kata Anwar.

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno tiba di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Pratikno datang didampingi sang istri menjelang pelantikan Wantimpres oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah calon anggota Wantimpres lainnya juga telah tiba di Istana Negara, di antaranya Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana, Ketua Umum PP Perma-budhi Philip Kuntjoro Widjaja, mantan Menko Polkam Budi Gunawan, serta peneliti senior sekaligus salah satu pendiri CSIS Jusuf Wanandi

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru

NASIONAL

Rismon Sianipar Soroti Sidang Ijazah Gibran: Kenapa Ahli Pendidikan Tak Dihadirkan?

Oleh Redaksi · 2 Okt, 08.14 WIB



Ahli digital forensik Rismon Sianipar. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyoroti para ahli yang dihadirkan kubu pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan kawan-kawan dalam sidang gugatan PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia mempertanyakan tidak diadakannya ahli pendidikan untuk menguji persoalan syarat pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Rismon, para ahli yang dihadirkan kubu Denny justru didominasi ahli hukum sehingga sejumlah argumentasi dinilai tumpang tindih.
Padahal, menurutnya, ahli pendidikan lintas negara dan sistem pendidikan dapat memberikan perspektif terkait sistem pendidikan yang ditempuh Gibran.

"Kenapa enggak dihadirkan ahli pendidikan lintas negara dan lintas sistem pendidikan yang berbeda, ini apakah tidak diadakannya ahli pendidikan lintas negara dan lintas sistem pendidikan itu menjadi kelemahan di pihak pemohon. Padahal banyak ahli paham pemetaan kurikulum, silabus maupun learning outcomes, itu ada banyak di universitas negeri kita, itu UNJ, universitas negeri lain juga," ujar Rismon kepada wartawan, Kamis (1/10/2026).
Dia menilai banyak ahli pendidikan yang dapat dihadirkan untuk memberikan penjelasan terkait sistem pendidikan lintas negara. Namun, kubu Denny disebut hanya menghadirkan ahli hukum.
"Bahkan yang dihadirkan itu semacam overlapping, tumpang tindih, ahli-ahli hukum saja. Padahal, basis argumentasi dalam

posisi mereka menyatakan surat keterangan Gibran itu cacat administratif dan ada rekayasa berupa manipulasi," tuturnya.
Rismon mengatakan seharusnya ada ahli yang dapat menjelaskan perbedaan sistem pendidikan lintas negara, termasuk sistem pendidikan berbasis atau berorientasi Cambridge.
Dia juga menyoroti pernyataan salah satu ahli yang menyebut surat keterangan kesetaraan ijazah Gibran tidak lazim.
Menurutnya, pernyataan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa surat tersebut tidak sah.
"Apa argumentasinya mengatakan tidak lazim, apa hanya karena formatnya, atau dia melakukan pengkajian berdasarkan pemetaan kurikulum, mulai dari O-Level Secondary Three-- Secondary

Three and Four, O-Level Secondary School Singapore, dan Foundation Studies, dan Diploma of Business Studies er di UTS Insearch, begitu loh," terangnya.
Menurut Rismon, ahli yang dihadirkan juga tidak menjelaskan secara terperinci bentuk ketidaklaziman surat keterangan kesetaraan ijazah yang dimaksud.
"Basis argumentasi ahlinya hanya sekilas dan hanya mengatakan tidak lazim, padahal posisi mereka mengatakan cacat administratif. Kenapa tidak berani mengatakan surat keterangan Gibran cacat. Ini menandakan ketidakpercayaan diri mereka, para pemohon, dengan tidak menghadirkan seorang pakar pendidikan," katanya.

NASIONAL

Ombudsman: Pindah Kamar Rp500 Ribu, Pegang HP Setara Harga Mobil di Rutan Pondok Bambu

Oleh Redaksi · 2 Okt, 14.53 WIB



BANDA ACEH – Ombudsman Republik Indonesia membongkar dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan fasilitas mewah alias "Lapas Sultan" di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur. Temuan ini mengungkap tingginya tarif yang harus dibayar warga binaan demi mendapatkan kenyamanan dan fasilitas terlarang di dalam tahanan.
Berdasarkan hasil temuan Ombudsman, praktik pungli di Rutan Pondok Bambu mematok tarif bervariasi tergantung pada jenis fasilitas yang diinginkan para tahanan. Untuk sekadar pindah ke kamar yang lebih nyaman, warga binaan dimintai tarif mulai dari Rp500 ribu.
Tak hanya soal kamar, peredaran dan penggunaan alat komunikasi berupa ponsel di dalam rutan juga dikenakan biaya yang sangat fantastis. Warga binaan yang ingin membawa serta mengoperasikan ponsel pintar di dalam sel disebut-

sebut harus merogoh kocek hingga mencapai ratusan juta rupiah.
Temuan ini mempertegas masih maraknya praktik penyalahgunaan wewenang dan lemahnya pengawasan di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Fasilitas eksklusif yang seharusnya dilarang keras justru menjadi komoditas bernilai ekonomis tinggi bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Ombudsman mendesak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk segera mengambil tindakan tegas. Selain melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di Rutan Pondok Bambu, sanksi berat juga diminta untuk dijatuhkan kepada para petugas atau oknum pejabat yang terbukti terlibat dalam jaringan pungli "Lapas Sultan" tersebut

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Sidang Ijazah Gibran, MK Panggil Atase Pendidikan KBRI Singapura hingga Kemendikdasmen Hari Ini

Oleh Redaksi · 2 Okt, 10.29 WIB



BANDA ACEH - Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Atase Pendidikan KBRI Singapura, Atase Pendidikan KBRI Australia, hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan memberikan keterangan dalam sidang yang digelar Jumat (2/10/2026).

"Hari ini sidang diagendakan untuk mendengar keterangan pemberi keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Atase Pendidikan KBRI Australia," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam persidangan.

Saldi menyampaikan, kedua atase pendidikan tersebut perlu menjelaskan proses pendidikan yang ditempuh Gibran di Singapura dan Australia. Selain itu, hakim akan menggali dokumen-dokumen yang dimiliki atase pendidikan maupun KBRI terkait proses pendidikan Gibran di kedua negara tersebut.

"Pertanyaan untuk kedua atase ini sama berkaitan dengan proses pendidikan yang ditempuh oleh pak Gibran dari awal sampai selesai," kata Saldi.

"Kemudian dokumen-dokumen apa saja yang dimiliki oleh atase atau KBRI kita berkaitan dengan proses awal sampai selesainya pendidikan yang bersangkutan

baik yang ditempuh di Singapura maupun Australia," lanjutnya.

Setelah meminta keterangan dari kedua atase pendidikan tersebut, MK akan mendengarkan penjelasan dari Kemendikdasmen. Keterangan kementerian akan difokuskan pada proses penyetaraan dokumen hasil pendidikan Gibran yang ditempuh di luar negeri.

"Setelah itu baru kami akan minta penjelasan atau keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena lebih fokus kepada justifikasi dokumen hasil di luar negeri itu untuk dilakukan penyetaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya

NASIONAL

Bahlil Jadi Menko Buah Loyalitas Golkar ke Prabowo

Oleh Redaksi · 2 Okt, 10.19 WIB



BANDA ACEH -Reshuffle kabinet diyakini akan terus berlangsung selama Prabowo Subianto menjabat sebagai RI-1. Setiap perombakan kabinet tidak bisa dianggap sebagai langkah terakhir.

"Bagi Prabowo reshuffle itu tidak pernah berakhir, sampai kekuasaan itu tidak lagi dimilikinya. Jadi kalau ini dibilang permulaan, ya setiap reshuffle adalah permulaan bagi presiden tidak pernah berakhir," kata Pengamat Politik Nurul Fatta kepada RMOL, Jumat, 2 Oktober 2026.

Ia juga menilai reshuffle dapat menjadi bentuk pemberian posisi kepada partai Politik yang dinilai loyal terhadap pemerintahan Prabowo.

"Reshuffle dilakukan untuk memberikan imbalan bagi partai yang sangat loyal terhadap Prabowo. Salah satunya Golkar, Bahlil dijadikan koordinator menteri, Cak Sarmuji dari sekjend Golkar juga diberi kursi menteri," ujarnya.

Fatta memandang, partai beringin itu selama ini menunjukkan komitmen terhadap pemerintahan Prabowo melalui sikap politik Ketua Umumnya Bahlil Lahadalia.

"Jadi apakah akan ada reshuffle lagi? Ya pasti. Jadi di level kementerian ini ada jenjang karirnya juga. Kita melihat semacam cursus honorum ala Prabowo. Menteri yang loyal naik jadi

menko, dan tangga naiknya adalah kedekatan dengan presiden. Kirakira begitu," tandasnya.

Bahlil Lahadalia resmi dilantik Prabowo sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2026.

Pengangkatan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026. Dengan jabatan tersebut, Bahlil tetap memimpin Kementerian ESDM sekaligus menjalankan tugas sebagai menteri koordinator.

NASIONAL

Dokter Tifa bakal Laporkan Hakim Perkaranya ke KY hingga DPR, Merasa Dibatasi Tanya Saksi

Oleh Redaksi · 2 Okt, 08.02 WIB



BANDA ACEH - Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa merasa dibatasi waktu ketika menggali keterangan saksi pada sidang perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (1/10/2026). Atas dasar itu, Tifa bakal melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial hingga DPR.

"Kami akan melaporkan perihal pembatasan waktu ini kepada pihak-pihak yang terkait, ya. Komisi Yudisial, Komnas HAM, karena ini berkaitan dengan hak asasi saya sebagai pihak yang dirugikan, sebagai pihak yang dikriminalisasikan dengan pasal berat,"

kata Tifa, dikutip Jumat (2/10/2026).

"Tentu saja kami keberatan dan kami laporkan ini ke Komisi III, ke Komisi Yudisial, ke Komnas HAM, dan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta beberapa pihak yang terkait, ya," tambahnya.

Diketahui, dalam persidangan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua orang saksi yakni Lechumanan dan Maret Samuel Sueken.

Dokter Tifa menilai terdapat ketidakadilan bila waktu yang diberikan untuk bertanya kepada saksi disamakan dengan JPU. Sebab, JPU menurutnya telah

menggali keterangan saksi sebelum dihadirkan ke persidangan.

"Jadi kami diminta kompromi, berkomitmen sama-sama dengan JPU. Ya tentu saja JPU cukup waktu sebentar, kenapa? Karena mereka sudah menggali sebelum sidang," ucap dia.

Dia menegaskan, pihaknya hanya memiliki kesempatan bertanya kepada saksi di ruang sidang.

"Kami punya kesempatan untuk menggali para saksi itu kan cuma di sidang ini. Di dalam persidangan. Sedangkan JPU sudah melakukan pemeriksaan terhadap semua saksi dan bukti itu sebelumnya, mereka punya waktu yang panjang, bahkan saya hitung 520 hari," katanya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Denny Indrayana Sentil Ahli KPU Keliru Tanggal Penetapan PKPU, Bukan Jauh Hari Sebelum Pencalonan Gibran

Oleh Redaksi · 2 Okt, 08.09 WIB



BANDA ACEH - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyentil ahli yang dihadirkan KPU dalam sidang perkara Perse-lisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 terkait per-syaratan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Denny menyebut ahli bernama Agus Riwanto tersebut keliru mengatakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 dibuat jauh sebelum pencalonan Gibran.

Mulanya, Agus Riwanto mem-bantah anggapan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 disusun untuk mengakomodasi pencalonan Gibran.

Agus menjelaskan, ketentuan tersebut lahir sebelum tahapan pencalonan pasangan calon presi-den dan wakil presiden dimulai. Dia menilai jika kemudian ada calon yang diuntungkan oleh ketentuan tersebut, hal itu bukan bagian dari kesengajaan pembuat aturan.

"Bahwa kemudian jika ada calon yang kebetulan memiliki kesempatan atau diuntungkan oleh peraturan itu, itu bukan sesuatu yang bersifat kesengajaan karena kebetulan saja karena PKPU ini lahir jauh sebelum pencalonan," ujar Agus dalam persidangan, Jumat (2/10/2026).

Pandangan tersebut langsung dibantah Denny Indrayana yang

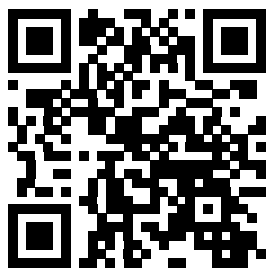
merupakan salah satu pemohon dalam perkara ini. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menilai keterangan Agus menge-nai waktu lahirnya PKPU 19/2023 tidak tepat.

Denny menyoroti PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang ditetapkan pada 9 Oktober 2023 dan diun-dangkan pada 13 Oktober 2023. Sementara itu, masa pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 ber-langsung pada 19-25 Oktober 2023.

"Jadi pernyataan saudara ahli bahwa peraturan ini ditetapkan jauh dari masa pencalonan keliru karena hanya berselang 7 hari," kata Denny.

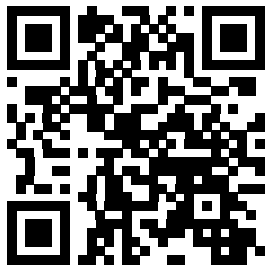
BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ANEKA BERITA

10 BERITA

OTOMOTIF

Dibekali Interior Modern, Suzuki XL7 Jadi Mobil SUV Keluarga yang Nyaman dan Fungsional

Oleh Redaksi · 2 Okt, 19.41 WIB



Memilih mobil SUV keluarga bukan hanya soal tampilan eksterior atau jumlah fitur yang tercantum dalam brosur. Bagi keluarga yang memiliki mobilitas tinggi, kenyamanan kabin, kapasitas penumpang, kemudahan bermanuver, hingga fitur keselamatan justru menjadi pertimbangan yang lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari.

Suzuki XL7 hadir dengan konfigurasi tiga baris dan kapasitas hingga tujuh penumpang, sehingga penggunaannya dapat disesuaikan untuk rutinitas harian maupun perjalanan bersama keluarga.

Mengapa Kenyamanan Kabin Penting untuk Mobil Keluarga?

Kemacetan membuat waktu yang dihabiskan di dalam mobil bisa cukup panjang, terutama bagi keluarga yang beraktivitas di kawasan perkotaan. Perjalanan mengantar anak ke sekolah, menuju kantor, berbelanja, atau berpindah dari satu kawasan ke kawasan lain membutuhkan kabin yang mampu menjaga kenyamanan seluruh penumpang.

Ruang juga menjadi faktor penting ketika mobil digunakan bersama keluarga. Pengemudi membutuhkan posisi berkendara yang nyaman, sementara penumpang membutuhkan ruang duduk yang memadai. Pada waktu tertentu, kebutuhan tersebut bisa berubah ketika keluarga harus membawa barang belanjaan, perlengkapan anak, atau koper untuk bepergian.

Suzuki XL7 Menawarkan Kabin untuk 7 Penumpang

Suzuki XL7 mengusung konfigurasi tiga baris tempat duduk dengan kapasitas hingga tujuh orang. Suzuki menyebut konsep kabinnya sebagai "Extra Spacious", yang dirancang untuk memberikan ruang bagi kebutuhan penumpang sekaligus barang bawaan.

Konfigurasi tersebut membuat XL7 cukup fleksibel digunakan dalam berbagai situasi. Saat seluruh anggota keluarga bepergian, ketiga baris dapat dimanfaatkan. Ketika jumlah penumpang lebih sedikit, ruang kabin dapat disesuaikan untuk mengakomodasi barang yang perlu dibawa.

Bagi keluarga yang membutuhkan mobil SUV keluarga untuk rutinitas sekaligus perjalanan akhir pekan, fleksibilitas dari Suzuki XL7 menjadi aspek yang relevan untuk diperhatikan.

Fitur Interior Suzuki XL7 yang Mendukung Kenyamanan Keluarga

Kenyamanan perjalanan tidak berhenti pada luasnya kabin. Suzuki XL7 dibekali sejumlah fitur yang dirancang untuk membuat aktivitas di dalam kendaraan lebih praktis. Pada generasi dan varian tertentu, tersedia 8-inch Display Audio, ventilated cup holder, keyless push start button, serta AC digital otomatis.

Fungsi tersebut terasa dalam situasi sederhana. Penumpang dapat menikmati hiburan selama perjalanan, minuman dapat ditempatkan pada cup holder dengan sistem ventilasi, sementara tombol start memudahkan pengemudi ketika hendak memulai perjalanan.

Varian tertentu juga menawarkan cruise control dan Smart e-Mirror Touch Screen dengan

kemampuan perekaman. Fitur e-Mirror dapat membantu memberikan pandangan tambahan ke area belakang kendaraan, terutama ketika kabin membawa banyak penumpang atau barang.

Kenyamanan Suzuki XL7 untuk Aktivitas Harian di Ibu-kota

Kondisi stop-and-go merupakan bagian dari keseharian berkendara di kawasan perkotaan. Mobil perlu mudah dikendalikan ketika berpindah jalur, memasuki area parkir, atau bermanuver di ruang yang terbatas.

Dalam spesifikasinya, Suzuki XL7 memiliki radius putar 5,1 meter. Angka tersebut menjadi salah satu aspek yang dapat diperhatikan ketika kendaraan digunakan untuk mobilitas perkotaan, meski kemudahan bermanuver tetap bergantung pada kondisi jalan dan kemampuan pengemudi.

Pada perjalanan harian, kenyamanan juga dapat terasa dari bagaimana fitur kendaraan membantu mengurangi pekerjaan kecil yang berulang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

EDUKASI

Rekomendasi AI Pembuat Game Edukasi Terbaik Mudah Digunakan Versi IDN Gaming

Oleh Redaksi · 2 Okt, 19.32 WIB



Membuat media pembelajaran interaktif kini makin mudah dengan memanfaatkan alat AI berdasarkan rekomendasi Portal IDN Gaming. Memasuki akhir 2026, tren pemanfaatan kecerdasan buatan di dunia pendidikan berkembang sangat pesat. Mulai dari guru sekolah dasar hingga pengajar tingkat lanjut kini bisa mengubah materi pelajaran menjadi gim yang siap dimainkan hanya dalam hitungan menit tanpa perlu menguasai koding. Kurasi ini telah dibagi menjadi 3 level utama agar kamu dapat memilih platform AI yang paling sesuai dengan kebutuhan ruang kelas maupun proyek digital milikmu.

Level 1: No-Code Tercepat Buat Guru Dan Kreator Konten

Level ini lagi viral di Indonesia. Alasannya simpel. Tanpa coding sama sekali, antarmuka drag-drop, hasil langsung jadi. Cocok buat guru PAUD, SD, SMP, sampai kreator TikTok edukasi yang butuh konten cepat, visual cerah, dan ramah anak. Kamu ketik, AI yang beresin logika game-nya.

1. Canva AI - Magic Studio

Ini juara bertahan. Kamu ketik prompt, langsung jadi game. Paling sering dipakai buat game sambung huruf, berhitung cepat, pesawat penjumlahan. Contoh prompt yang dipakai guru: "Buat game menyambungkan huruf hijaiyah Ramadhan untuk anak SD". Kelebihannya gratis, bisa langsung share link, desain super ramah anak. Kekurangannya gameplay masih simple, lebih ke puzzle kasual. Tapi buat ice breaking 5 menit, ini paling efektif. Anak langsung nempel.

2. Gemini Canvas + Google Sites

Kalau Canva itu sepeda, ini motornya. Gemini Canvas memungkinkan kamu minta dibuatkan game kosakata bahasa Inggris, kuis interaktif, simulasi sains,

media berbasis web HTML5. Hasilnya bisa langsung di-hosting pakai Google Sites dan GitHub tanpa sentuh code. Paling pas buat kamu yang nulis artikel tutorial di idngaming.com terus embed game-nya di dalam artikel. Waktu jadi sekitar 10-15 menit, tapi fleksibilitasnya jauh lebih tinggi. Kamu bisa minta revisi langsung: tambah skor, tambah suara, ganti tema Nusantara.

3. Educaplay AI

Spesialis game edukasi klasik yang di-boost AI. Platform ini memang dirancang buat mengubah materi tradisional jadi aktivitas interaktif. Fiturnya lengkap: kuis, teka-teki silang, word search, matching pairs, video quiz, sampai peta interaktif. Gratis, ada template siap pakai ratusan. Guru SMP dan SMA suka banget karena bisa convert LKS jadi game dalam 10 menit. Engagement naik, anak tidak bosan menghafal.

4. MagickPen - Pembuat Game Edukasi Kustom

Ini buat materi berat yang butuh disederhanakan. Caranya beda. Kamu kasih detail kursus dan tujuan pembelajaran, pilih template, MagickPen yang bikinin game kustom. Misal materi Sejarah Romawi, Mekanika Kuantum, ekonomi syariah. Dia sesuaikan level kesulitan dan narasi. Cocok buat dosen atau kreator kelas online yang materi-nya padat. Waktu proses sekitar 15 menit, hasilnya lebih dalam dari sekadar kuis.

Level 2: Kuis Dan Game Kelas Interaktif

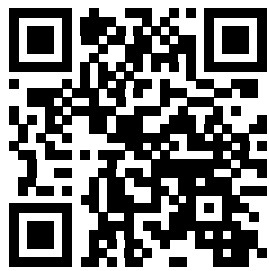
Level ini fokus ke engagement real-time di kelas. Bukan sekadar bikin game, tapi bikin kelas hidup. Guru butuh battle, leaderboard, reaksi cepat. Tiga platform ini lagi rebutan pasar sekolah Indonesia tahun ini.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

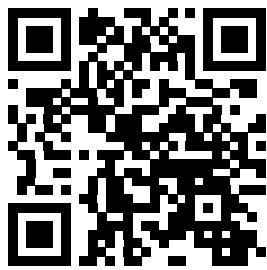
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



EKONOMI

Investasi Forklift untuk Bisnis: Faktor Penting yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Membeli

Oleh Redaksi · 2 Okt, 19.35 WIB



Forklift telah menjadi salah satu peralatan penting dalam mendukung aktivitas operasional berbagai sektor industri, mulai dari pergudangan, manufaktur, logistik, hingga distribusi. Seiring meningkatnya kebutuhan efisiensi dalam proses pemindahan material, investasi forklift kini tidak lagi dipandang sebagai pengeluaran semata, melainkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas bisnis. Namun, sebelum memutuskan pembelian, terdapat sejumlah faktor penting yang perlu dipertimbangkan agar investasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat optimal dalam jangka panjang.

Mengapa Investasi Forklift Menjadi Keputusan Strategis?

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, kecepatan dan efisiensi operasional menjadi faktor penentu keberhasilan perusahaan. Penggunaan forklift membantu mempercepat proses bongkar muat barang serta meminimalkan ketergantungan terhadap pemindahan material secara manual.

Selain meningkatkan produktivitas kerja, forklift juga berkontri-

busi terhadap keselamatan kerja karena dirancang untuk menangani beban berat secara lebih aman. Oleh sebab itu, pemilihan unit yang tepat menjadi aspek penting untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan.

Investasi pada peralatan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis juga dapat membantu mengurangi biaya operasional yang tidak perlu di masa mendatang.

Faktor Penting Sebelum Membeli Forklift

Memilih forklift tidak hanya mempertimbangkan harga pembelian. Berbagai aspek teknis dan operasional perlu dianalisis agar alat yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan forklift sekaligus memperoleh nilai investasi yang lebih baik.

Tentukan Kapasitas Angkat yang Dibutuhkan

Salah satu hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kapasitas angkat forklift. Setiap unit dirancang untuk menangani beban

tertentu sehingga penting untuk mengetahui berat rata-rata material yang akan dipindahkan.

Pemilihan kapasitas yang terlalu kecil dapat meningkatkan risiko kerusakan alat dan mengganggu kelancaran operasional. Sebaliknya, kapasitas yang terlalu besar dapat menyebabkan investasi menjadi kurang efisien.

Oleh karena itu, perusahaan disarankan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan aktual sebelum menentukan spesifikasi forklift yang akan dibeli.

Sesuaikan dengan Lingkungan Operasional

Lingkungan kerja turut mempengaruhi jenis forklift yang paling sesuai digunakan. Area pergudangan tertutup umumnya membutuhkan forklift baterai yang memiliki tingkat kebisingan rendah dan tidak menghasilkan emisi gas buang.

Sementara itu, aktivitas operasional di luar ruangan dengan medan yang lebih menantang dapat memerlukan forklift berbahan bakar diesel yang memiliki tenaga lebih besar. Memahami karakteristik area kerja akan membantu

perusahaan menentukan pilihan yang tepat.

Pertimbangan ini juga penting untuk mendukung keselamatan kerja serta efisiensi penggunaan alat dalam jangka panjang.

Perhatikan Tinggi Angkat dan Dimensi Lorong

Setiap fasilitas penyimpanan memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk tinggi rak penyimpanan dan lebar lorong pergerakan alat. Faktor ini perlu diperhatikan agar forklift dapat beroperasi secara optimal.

Pemilihan unit dengan spesifikasi tinggi angkat yang sesuai akan membantu meningkatkan efektivitas proses penyimpanan barang. Selain itu, dimensi forklift yang tepat dapat memudahkan manuver di area kerja yang terbatas.

Evaluasi terhadap tata letak gudang sebelum pembelian menjadi langkah penting untuk menghindari kendala operasional di kemudian hari.

Pertimbangan Biaya dalam Investasi Forklift

» [Selengkapnya di www.harianaceh.co](http://www.harianaceh.co.id)

TEKNOLOGI

Geger! Elon Musk Sebut Instagram Hanya untuk Perempuan

Oleh Redaksi · 2 Okt, 14.56 WIB



BANDA ACEH - Elon Musk kembali membuat heboh media sosial setelah menyebut Instagram sebagai platform yang diperuntukkan bagi perempuan. Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun X miliknya dan langsung memicu beragam reaksi dari pengguna media sosial.

Komentar itu muncul ketika Elon Musk merespons unggahan akun Geiger Capital pada 1 Oktober 2026. Dalam unggahannya, akun tersebut mengatakan telah menghapus Instagram dan menyebut aplikasi tersebut sebagai platform yang secara inheren ditujukan untuk perempuan serta tidak memberikan manfaat.

Menanggapi unggahan tersebut, Elon Musk hanya menulis singkat, "Instagram is for girls."

Komentar Musk kemudian viral dan mendapat ribuan respons dari pengguna X. Sebagian pengguna menyetujui pernyataan tersebut, sementara lainnya mempertanyakan anggapan bahwa Instagram hanya ditujukan bagi perempuan.

Pernyataan ini bukan kali pertama Musk melontarkan komentar serupa. Pada Mei 2026, pemilik X tersebut juga pernah menulis "Instagram is for girls" ketika

merespons diskusi viral mengenai kebiasaan menggunakan media sosial.

Dalam kesempatan itu, Musk juga menyindir laki-laki yang mengirimkan tautan profil Instagram mereka kepadanya. Pernyataannya saat itu turut memicu perdebatan di media sosial.

Komentar terbaru Musk kembali muncul di tengah rivalitas panjang antara platform miliknya, X, dan perusahaan yang menaungi Instagram, Meta. Persaingan tersebut juga berkaitan dengan Threads, platform media sosial berbasis teks milik Meta yang diluncurkan pada 2023 sebagai bagian dari ekosistem Instagram.

Namun, pernyataan Musk mengenai Instagram bukanlah gambaran faktual mengenai komposisi pengguna platform tersebut.

Data global yang dihimpun We Are Social, DataReportal, dan Meltwater menunjukkan pengguna Instagram berdasarkan gender pada 2025 relatif berimbang, bahkan kelompok pengguna laki-laki sedikit lebih besar daripada perempuan. Data tersebut merujuk pada audiens yang dapat dijangkau melalui iklan Instagram secara global

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

Irwansyah Soroti Tingginya Angka Perceraian dan Kekerasan Anak di 80 Persen Gugatan Diajukan Istri

Oleh Redaksi · 2 Okt, 19.58 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH — Ketua DPRK Irwansyah, ST, menyoroti tingginya angka perceraian serta kasus kekerasan seksual terhadap anak di Banda Aceh. Hal itu disampaikannya setelah melakukan kunjungan dan silaturahmi ke Mahkamah Syar'iyah Rabu (30/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Irwansyah disambut Ketua Mahkamah Syar'iyah Amir Khalis, bersama sejumlah pejabat di lingkungan lembaga tersebut.

Irwansyah melihat langsung kondisi gedung dan fasilitas Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh serta berdiskusi mengenai berbagai perkara yang tengah ditangani lembaga tersebut.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah tingginya angka perceraian di Banda Aceh. Berdasarkan data yang disampaikan kepadanya dari Mahkamah Syar'iyah sepanjang Januari hingga September 2026 terdapat

lebih dari 300 perkara perceraian yang ditangani.

Dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen merupakan gugatan yang diajukan oleh pihak istri.

"Melihat kondisi ini, tentu membutuhkan perhatian semua pihak di Banda Aceh. Jangan sampai kondisi rumah tangga atau keluarga warga kita semakin rapuh, ini yang sangat kita khawatirkan," ujar Irwansyah.

Politikus PKS tersebut mengatakan ketahanan keluarga perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, diperlukan sinergi berbagai pihak serta program yang secara khusus dapat memperkuat ketahanan rumah tangga sekaligus mencegah terjadinya perceraian.

Berdasarkan data dan pembahasan yang diperolehnya, Irwansyah menyebut sejumlah faktor yang menjadi penyebab dominan perceraian, antara lain judi online, persoalan ekonomi, perilaku suami yang tidak bertanggung jawab atau

tidak produktif, serta kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga.

"Karena itu, semua pihak harus saling bahu-membahu dalam membangun ketahanan rumah tangga dan keluarga di " katanya.

Kasus Kekerasan terhadap Anak Jadi Alarm

Selain perkara perceraian, Irwansyah menyoroti sejumlah perkara pidana jinayah yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Salah satu yang dinilainya memprihatinkan adalah perkara kekerasan seksual terhadap anak.

Ia menyebut terdapat kasus dengan pelaku yang berasal dari lingkungan keluarga sendiri, termasuk ayah yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak serta kakek terhadap cucunya.

Bahkan, terdapat korban yang masih berusia empat tahun.

"Ini sangat miris. Ada anak yang menjadi korban oleh ayahnya sendiri, ada yang dilakukan oleh

kakeknya, dan berbagai kasus lainnya. Semoga ini menjadi alarm bagi kita semua," ujar Irwansyah.

Menurutnya, berbagai perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh harus menjadi bahan evaluasi dan perhatian bersama, baik dalam hal ketahanan keluarga maupun perlindungan terhadap anak.

Irwansyah mengajak para orang tua dan keluarga meningkatkan pengawasan serta memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak. Ia juga mengingatkan agar kewaspadaan tidak hanya ditujukan kepada orang asing, tetapi juga lingkungan sekitar, termasuk orang-orang terdekat.

"Orang-orang terdekat yang seharusnya melindungi anak justru bisa menjadi pihak yang menghancurkan masa depan mereka. Karena itu, kita semua harus lebih waspada dan menjaga anak-anak kita," tegasnya.[]

SPORT

Ngeri! Pemain Timnas Indonesia Diteror Ancaman Pembunuhan

Oleh Redaksi · 2 Okt, 10.35 WIB



BANDA ACEH – Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan pemain Skuad Garuda menerima perundungan online hingga ancaman pembunuhan di tengah perjuangan mereka pada FIFA ASEAN Cup 2026.

Herdman menyampaikan persoalan serius tersebut selepas Timnas Indonesia menghadapi Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Skuad Garuda memetik kemenangan telak 9-2 sekaligus memastikan tiket ke babak final.

Di balik keberhasilan tersebut, Herdman menyoroti perlakuan sejumlah warganet terhadap pemain Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu menyayangkan munculnya hinaan dan serangan personal ketika pemain menghadapi tekanan.

"Dan saya berharap kalian memperlakukan orang dengan lebih baik. Ketika situasinya sulit, saya berharap kalian memperlakukan orang dengan lebih baik," kata Herdman.

"Karena beberapa hal yang dikatakan tentang dia dan pemain lainnya tidak benar. Perundungan secara online itu tidak benar," tambahnya.

Herdman menilai media sosial membuat seseorang semakin mudah melontarkan hinaan tanpa berhadapan langsung dengan orang

yang menjadi sasaran. Menurut dia, tindakan tersebut tetap mempunyai dampak nyata terhadap kondisi mental pemain.

"Sangat mudah mengirim hinaan sambil bersembunyi di balik keyboard atau telepon. Tetapi secara mental, itu menyakitkan," ujar Herdman.

Dia kemudian mengungkap bentuk serangan yang diterima pemain tidak berhenti pada perundungan. Sejumlah pemain, menurut Herdman, bahkan mendapatkan ancaman pembunuhan.

"Anak-anak kami mendapatkan ancaman pembunuhan. Itu menyakitkan," katanya.

Herdman berharap masyarakat dan pencinta sepak bola Indonesia bisa lebih bijak dalam memberikan kritik kepada pemain. Dia mengingatkan pemain sepak bola tetap manusia yang dapat terdampak oleh serangan maupun ancaman di dunia maya.

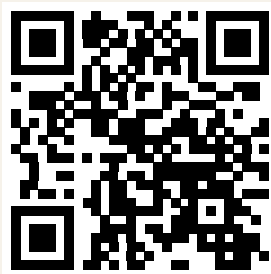
"Kita harus lebih baik dari ini. Kita harus lebih baik dari ini. Kita semua manusia," ucap Herdman.

Timnas Indonesia kini harus mengalihkan fokus menuju pertandingan terakhir FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Thailand pada laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (5/10/2026)

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



INTERNASIONAL

Jaringan Listrik Masjid Nabawi Ikut Hancur Akibat Serangan Drone Houthi

Oleh Redaksi · 2 Okt, 07.59 WIB



BANDA ACEH -Serangan drone kelompok Houthi kembali meng-guncang Arab Saudi. Kali ini, insi-den tersebut merusak jaringan lis-trik yang memasok pasokan ke Masjid Nabawi di Madinah, salah satu situs paling suci dalam Islam. Berdasarkan laporan The Natio-nal pada Jumat, 2 Oktober 2026, peristiwa itu terjadi pada Selasa pagi 29 September 2026 waktu setempat dan mengakibatkan kerusakan pada sebuah transfor-mator listrik di Madinah. Hasil pemeriksaan terhadap puing-puing drone oleh koalisi militer pimpin-an Arab Saudi di Yaman mengonfirmasi keterlibatan kelompok Houthi dalam serangan tersebut. Juru bicara militer Saudi, Mayjen Turki Al Malki, dengan tegas mengecam tindakan tersebut karena secara langsung menyasar kepentingan umat Muslim. "Pemeriksaan puing-puing pesa-wat tak berawak tersebut memasti-kan keterlibatan milisi Houthi

yang teroris dalam merencanakan dan melaksanakan aksi teroris pengecut ini," ujar Al Malki. Insiden di Madinah ini menjadi catatan kedua dalam dua pekan terakhir yang menyasar situs-situs suci di Arab Saudi. Sebelumnya, koalisi Saudi menyatakan telah menghancurkan sebuah drone Houthi di wilayah selatan Makkah sebelum berhasil memasuki zona udara terlarang kota suci tersebut. Sebagai dua situs paling mulia bagi umat Islam, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Makkah kembali berada dalam bayang-bayang ancaman. Al Malki menyebut rentetan serangan ini sebagai bentuk "provokasi yang disengaja terhadap jutaan umat Muslim di seluruh dunia dengan menargetkan Mekah dan Madi-nah." Kecaman keras juga datang dari Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Jasem Al Budaiwi. Ia menilai tindakan Houthi telah "melanggar semua

batasan" serta menjadi "eskalasi serius dalam melanggar kesucian situs-situs suci Islam." Senada dengan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) turut mengecam serangan itu sebagai pelanggaran atas kedaulatan Arab Saudi serta anca-man nyata bagi keamanan regio-nal. Meningkatnya intensitas sera-ngan ini beriringan dengan mema-nasnya kembali pertempuran antara kelompok Houthi dan pasu-kan pemerintah Yaman. Houthi, yang kini menguasai ibu kota Sanaa serta sebagian besar kawa-san utara Yaman, telah lama terli-bat konfrontasi dengan pemerinta-han yang diakui secara internasio-nal. Pada Kamis, bentrokan sengit dilaporkan pecah di sejumlah titik di Provinsi Taiz. Kantor berita pemerintah, Saba, melaporkan bahwa pasukan pemerintah berhas-il memukul mundur serangan

Houthi setelah pertempuran ber-langsung selama berjam-jam. Situasi ini kian memperparah ketegangan di kawasan, menyusul gangguan berkelanjutan pada jalur pelayaran strategis di Laut Merah yang kerap menjadi target agresi Houthi. Konflik bersenjata di Yaman sendiri telah membara sejak kelompok tersebut merebut Sanaa pada 2014, yang disusul oleh intervensi koalisi pimpinan Arab Saudi setahun kemudian. Meski sempat mereda berkat gen-catan senjata dimediasi PBB pada 2022, permusuhan kembali memuncak pada musim panas tahun ini. Di tengah situasi konflik yang terus memanas, pemerintah Arab Saudi pada Kamis mengumumkan penyaluran bantuan finansial seni-lai lebih dari 224 juta Riyal atau setara dengan sekitar 60 juta Dolar AS kepada pemerintah Yaman. » [Selengkapnya di www.harianaceh.co.id](http://www.harianaceh.co.id)

ACEH

Wagub Aceh Usulkan Alat Berat Sistem Pinjam Pakai untuk Daerah Rawan Banjir

Oleh Redaksi · 2 Okt, 14.38 WIB



BANDA ACEH, Banda Aceh — Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh mengusulkan penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi kabupaten/kota yang berada di daerah rawan banjir.

Usulan tersebut disampaikan Dek Fadh dalam rapat tindak lanjut hasil rapat koordinasi penan-ganan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang berlang-sung secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Jumat (2/10/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Jen-deral Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Tomsu Tohir dan membahas sejumlah agenda, di antaranya antisipasi bencana susu-lan, penguatan sistem peringatan dini, serta percepatan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak. Rapat tersebut turut diikuti kementerian dan lembaga terkait, kepala daerah, serta unsur pena-nganan bencana dari masing-masing wilayah terdampak.

Dalam rapat, Dek Fadh menga-takan ketersediaan alat berat di daerah diperlukan untuk memper-cepat penanganan saat banjir ter-jadi, khususnya untuk pengerukan dan normalisasi sungai. Menurut dia, pemerintah kabupaten/kota juga dapat memanfaatkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk men-dukung operasional alat berat sehingga penanganan di lapangan dapat dilakukan lebih cepat.

“Kami mengusulkan solusi agar kabupaten/kota yang rawan banjir ini diberikan alat berat, minimal empat ekskavator dengan sistem pinjam pakai. Dengan begitu, ketika terjadi banjir, pemerintah daerah bisa langsung bergerak karena kepala daerah lebih menge-tahui kondisi dan kebutuhan wila-yahnya,” ujar Dek Fadh.

Sungai Mengalami Pendangka-lan

Dek Fadh menjelaskan kebutu-han alat berat tersebut berkaitan dengan kondisi sejumlah sungai di Aceh yang mengalami pendangka-lan dan perubahan alur setelah ter-jadi banjir.

Kondisi tersebut, kata dia, turut berdampak pada sejumlah infras-truktur yang sebelumnya telah dibangun kembali pascabencana.

Ia mencontohkan dua jembatan yang telah selesai dikerjakan oleh TNI kembali mengalami kersa-kan akibat banjir yang terjadi baru-baru ini.

Selain penyediaan alat berat, Dek Fadh juga menyampaikan perlunya penyesuaian mekanisme pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam kondisi darurat.

Ia mengusulkan agar mekanisme penanganan sungai dalam situasi darurat dapat disederhanakan sehingga pekerjaan mendesak tidak terhambat prosedur yang membutuhkan waktu lebih pan-jang.

“Untuk kondisi darurat, kami berharap ada mekanisme yang dapat mempermudah pekerjaan di lapangan, misalnya melalui surat kepala posko atau kepala satgas dengan diketahui kementerian dan dinas terkait. Yang penting, pena-nganan bisa segera dilakukan,” ucapnya.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Posko Satuan Tugas Perce-patan Rehabilitasi dan Rekons-truksi (Satgas PRR) menyatakan masukan tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota melengkapi pen-dataan agar penanganan dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran.[]

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

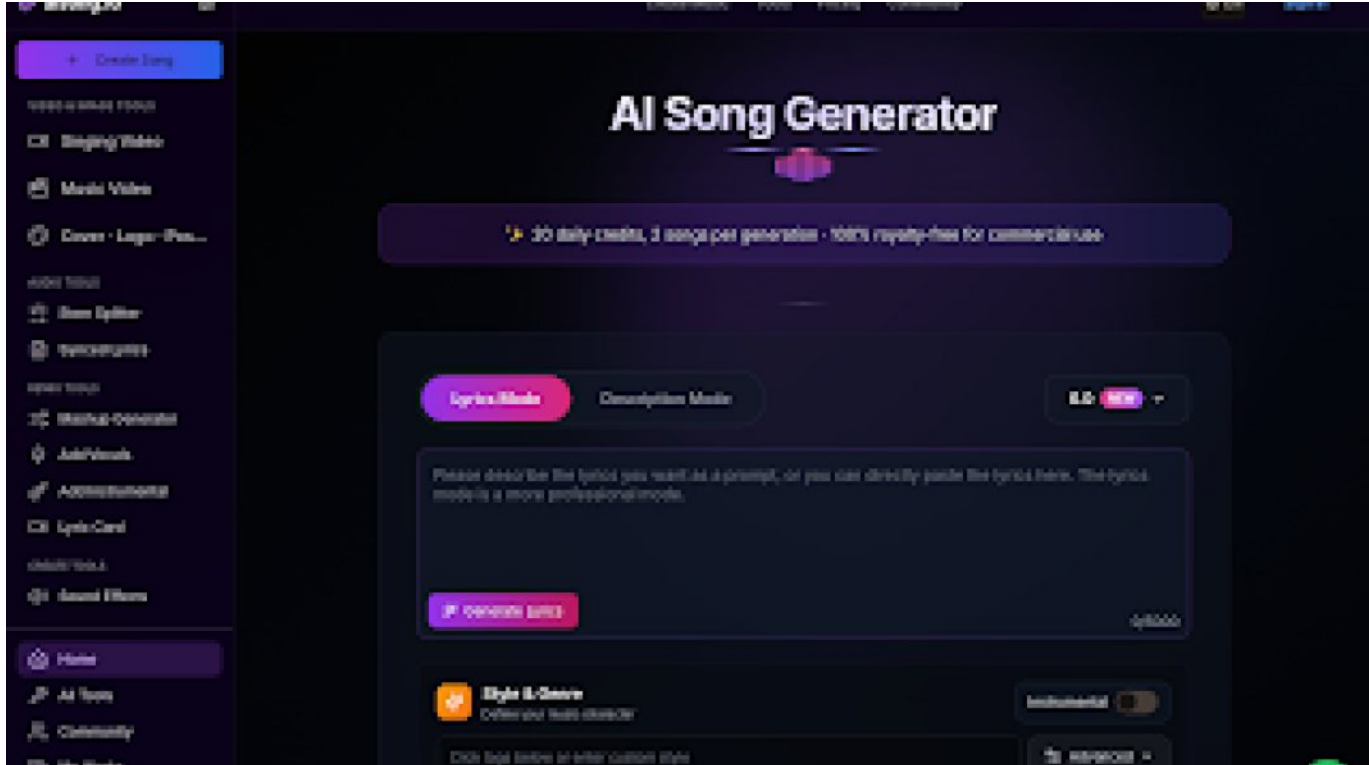
Pindai kode QR untuk berita terbaru



TEKNOLOGI

5 Best AI Music Tools for Lyrics Vocals and Full Songs

Oleh Redaksi · 2 Okt, 01.31 WIB



BANDA ACEH - A lyric becomes easier to evaluate when it is attached to melody, phrasing, and a believable arrangement.

AI music tools now offer several ways to reach that point: some generate a complete vocal song, some specialize in voice transformation, and others create the instrumental foundation that a singer or producer can finish.

Choosing well depends on whether the project begins with words, a vocal identity, or a production brief.

AI Song and MakeSong are the most complete lyric-to-song choices in this group. Musicfy stands out for custom and licensed AI voice workflows. Loudly offers detailed control over instrumental production and exports, while Boomy gives beginners a quick route into original music and optional vocal additions.

How We Assessed Lyrics and Vocals

This list prioritizes the relationship between words and performance. We examined whether a tool can accept original lyrics, turn them into intelligible phrasing, support a distinct vocal direction, and place that voice inside a coherent arrangement. Instrumental-only services remain relevant when they create enough space and structure for a singer to finish the record elsewhere.

A useful test begins with the same lyric but changes the desired delivery: restrained verse, stronger chorus, clear diction, and an intentional instrumental break. We then consider whether the creator can revise the voice, arrangement, or backing track without abandoning the whole draft. Rights are part of the workflow too, especially for uploaded recordings and voice

models, so authorized source material is a baseline requirement.

AI Song

AI Song homepage
Lyrics and Vocal Workflow

For lyric-centered work, an AI Song Maker is useful only if the words become a believable performance. AI Song builds vocals, melody, arrangement, mixing, and mastering around either supplied lyrics or a written idea, allowing the writer to hear pacing and emotional emphasis immediately. Its lyric and audio utilities also help when a line needs rewriting, a vocal needs removal, or stems are required for a cleaner production handoff.

Production Options
Paste a clearly formatted lyric and describe the vocalist's energy, tone, and relationship to the listener. Mark the section where the delivery should open up, then

compare generations for diction and phrasing before judging polish. If the chorus lands but a verse feels crowded, revise the syllable count or arrangement request instead of assuming the vocal model alone caused the problem.

Best Fit
AI Song is a strong fit for lyricists who need melody and performance to expose strengths and weaknesses in the text. It also helps creators prepare a complete vocal reference for singers, collaborators, or clients. The workflow works best when the writer is willing to edit generic phrases after hearing how they occupy musical time.

MakeSong

MakeSong homepage
Lyrics and Vocal Workflow

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

EDUKASI

Bank Aceh Syariah Resmi Integrasikan Pembayaran UKT Universitas Teuku Umar di Action Mobile

Oleh Redaksi · 2 Okt, 15.58 WIB



Mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU) dimudahkan membayar SPP dengan menggunakan aplikasi Action Bank Aceh Syariah. FOTO/Dok. BAS untuk HAI.

MEULABOH — Universitas Teuku Umar (UTU) bersama Bank Aceh Syariah resmi menghadirkan kemudahan transaksi administrasi perkuliahan secara digital.

Melalui penambahan fitur pembayaran perguruan tinggi di aplikasi Action Mobile, mahasiswa UTU kini dapat melakukan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) langsung dari telepon pintar tanpa perlu mengantre di kantor cabang maupun loket bank.

Pengembangan layanan transaksi digital untuk sektor pendidikan ini diumumkan Bank Aceh melalui kanal resminya pada Jumat (2/10/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Bank Aceh Syariah dalam memperluas ekosistem transaksi nontunai serta mendukung digitalisasi kampus di Aceh.

Panduan Tata Cara Pembayaran

Untuk menyelesaikan tagihan akademik melalui aplikasi Action Mobile, mahasiswa cukup mengikuti tahapan berikut:

- Buka aplikasi Action Mobile Bank Aceh dan login menggunakan akun masing-masing.
- Pilih menu Layanan, lalu klik kategori Pendidikan.
- Masuk ke menu Perguruan Tinggi dan pilih Universitas Teuku Umar (UTU).
- Masukkan nomor invoice atau nomor pembayaran yang tertera pada akun portal akademik mahasiswa (PINTOE UTU).
- Periksa kembali rincian data

tagihan dan nama yang muncul pada layar konfirmasi.

- Masukkan PIN transaksi untuk menyelesaikan pembayaran, lalu simpan resi atau bukti transaksi digital yang diterbitkan.

Perluasan Ekosistem Digital Bank Aceh

Aplikasi Action Mobile (Aceh Transaksi Online) dirancang untuk memfasilitasi berbagai transaksi finansial nasabah, mulai dari cek saldo, transfer, hingga pembayaran utilitas seperti listrik, pajak, zakat, dan pendidikan.

Sebelumnya, Bank Aceh telah melayani pembayaran UKT berbasis aplikasi untuk sejumlah perguruan tinggi di Aceh, seperti UIN Ar-Raniry dan Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA).

Integrasi layanan bagi mahasiswa UTU ini makin mempertegas perluasan cakupan transaksi digital perbankan daerah tersebut.

Kehadiran fitur ini menjadi solusi praktis, khususnya bagi mahasiswa UTU yang berada di luar wilayah Kabupaten Aceh Barat, sehingga proses administrasi akademik dapat diselesaikan secara cepat, aman, dan fleksibel dari mana saja.

Bank Aceh juga mengingatkan seluruh nasabah untuk senantiasa menjaga kerahasiaan data pribadi, username, password, serta MPIN.

Apabila mahasiswa membutuhkan bantuan teknis terkait kendala transaksi pada aplikasi Action Mobile, layanan Contact Center Bank Aceh dapat diakses melalui nomor 1500845.

Install Aplikasi

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

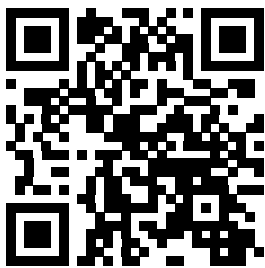
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia